



LAPORAN **KINERJA**

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

2024

20
24

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang telah disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2025

Kepala Biro Pengawasan Internal,

Tri Purno Utomo

Amanat Presiden

Dumai, 1 Juni 2024



"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, menunjukkannya dalam ucapan, perilaku dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menjadikan Indonesia berwibawa di mata dunia."

Joko Widodo - Presiden R.I

HIGHLIGHT 2023



JANUARI

25 RAPAT KERJA BPIP TAHUN 2024



FEBUARI

27 PENGENDALIAN PIP KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEPRESIDENAN



MARET

1 GOTONG ROYONG MENURUNKAN STUNTING DI KABUPATEN GROBOKAN



APRIL

22 SOSIALISASI IMPLEMENTASI BUKU TEKS UTAMA PANCASILA PADA SATUAN PENDIDIKAN DIBAWAH KEMENAG



MEI

6 PANCASILA SAKA ADISAKA



JUNI

1 UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA





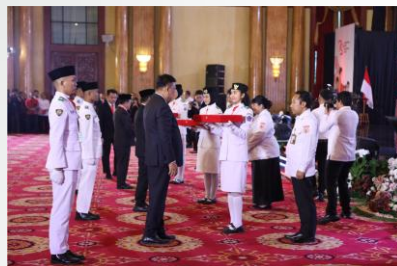
JULI

7 ADVOKASI PIP GUNA MENCEGAH BULLYING



AGUSTUS

9 PENYERAHAN DUPLIKAT BENDERA PUSAKA



SEPTEMBER

9 FGD ERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA



OKTOBER

2 SOSIALISASI PANCASILA DI ENTIKONG



NOVEMBER

7 DIKLAT PIP PASKIBRAKA



DESEMBER

3 REFLEKSI AKHIR TAHUN 2024 BPIP
"MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA"



DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Highlight 2023.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Istilah.....	ix
Kata Pengantar.....	xi
Ringkasan Eksekutif.....	xii
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Aspek Strategis.....	7
E. Isu Strategis.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
Bab II Perencanaan Kinerja.....	12
A. Rencana Strategis BPIP.....	12
B. Rencana Kerja BPIP.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
D. Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja.....	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
a. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.....	25
b. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda.....	36
c. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional.....	69
d. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.....	77
B. Capaian Realisasi Anggaran.....	87
C. Hambatan.....	90
D. Upaya Mengatasi Hambatan.....	94
E. Rencana Ke Depan.....	96
Bab IV Penutup.....	100
Lampiran.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia BPIP	6
Tabel 2. 1 Rincian Rencana Kerja Tahun 2024.....	16
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2024	18
Tabel 2. 3 Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP	20
Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Instansi (NKI) 2024.....	24
Tabel 3. 3 Laporan Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP Tahun 2024	25
Tabel 3. 4 IKU Capaian Sasaran Strategis 1.....	25
Tabel 3. 5 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP	34
Tabel 3. 6 IKU Capaian Sasaran Strategis 2.....	36
Tabel 3. 7 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga.....	37
Tabel 3. 8 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Orsospol dan komponen masyarakat lainnya	45
Tabel 3. 9 MoU & Perjanjian Kerjasama Pengarustamaan Ideologi Pancasila	57
Tabel 3. 10 Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik	59
Tabel 3. 11 Kelompok Masyarakat yang telah dilakukan pembudayaan ...	61
Tabel 3. 12 Daftar Peraturan/Regulasi yang diberikan Rekomendasi.....	65
Tabel 3. 13 IKU Capaian Sasaran Strategis 3.....	69
Tabel 3. 14 Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden.....	69
Tabel 3. 15 Perbandingan Rekomendasi Tahun 2024 dengan 2023	70
Tabel 3. 16 Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Pengendalian	74
Tabel 3. 17 Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	75
Tabel 3. 18 IKU Capaian Sasaran Strategis 4.....	77
Tabel 3. 19 Evaluasi RB BPIP Tahun 2024.....	78
Tabel 3. 20 Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP	83
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rapat Kerja BPIP Tahun 2024	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPIP	5
Gambar 1. 3 Isu Strategis BPIP	8
Gambar 2. 1 RPJMN 2020-2024 Terkait PIP	12
Gambar 2. 2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPIP Tahun 2020-2024.....	15
Gambar 2. 3 Rapat Pleno Bulanan	19
Gambar 2. 4 Ilustrasi Penilaian Kinerja	20
Gambar 2. 5 Laporan Triwulanan Tahun 2024.....	21
Gambar 3. 1 Milestone Kegiatan Penghitungan IAP 2023	27
Gambar 3. 2 Proses Perhitungan IAP	27
Gambar 3. 3 Indikator Penyusun IAP	28
Gambar 3. 4 Indikator Penyusun IAP	29
Gambar 3. 5 Perbandingan Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2022- 2023	30
Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian Sila 2.....	31
Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian Sila 3.....	32
Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian Sila 2.....	32
Gambar 3. 9 Perbandingan Capaian Sila 5.....	33
Gambar 3. 10 Perbandingan Capaian Sila 4.....	33
Gambar 3. 11 Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat PIP Calon Maheswara	35
Gambar 3. 12 Dokumen Pengkajian PIP 2024.....	72
Gambar 3. 13 NSPK Materi, Bahan Ajar, Implementasi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila	73
Gambar 3. 14 Nilai SKM BPIP Tahun 2021-2024	86
Gambar 3. 15 Realisasi Anggaran Total	87
Gambar 3. 16 Realisasi Anggaran per Program	88
Gambar 3. 17 Realisasi Anggaran per Unit Kerja	88

DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenpanRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
Mapel	: Mata Pelajaran
Medsos	: Media Sosial
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang

SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Kata Pengantar

Kepala BPIP



Prof. K.H Drs. Yudian wahyudi, M.A. Ph.D

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini berisi uraian mengenai perencanaan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, serta berbagai pencapaian strategis BPIP sepanjang tahun 2024.

Tahun 2024 menjadi periode yang sarat dengan tantangan, mulai dari dinamika transisi pemerintahan, meningkatnya polarisasi politik, hingga isu-isu global yang berdampak pada stabilitas nasional. Dalam situasi ini, peran Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa semakin krusial. Pancasila tidak sekadar menjadi doktrin moral, tetapi harus menjadi kompas dalam membimbing penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, memastikan kebijakan publik berlandaskan nilai-nilai luhur, serta mendorong terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Berbagai evaluasi terhadap akuntabilitas penyelenggara negara menunjukkan bahwa integritas birokrasi masih menghadapi ujian berat. Kasus-kasus pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang yang muncul di berbagai sektor mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya tertanam dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, BPIP terus mendorong peningkatan kapasitas dan karakter kebangsaan para pemangku kepentingan, agar Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan dan praktik pemerintahan.

Di tengah era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan dalam penyebaran ideologi Pancasila juga semakin kompleks. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial menghadirkan peluang sekaligus ancaman dalam memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. BPIP terus berinovasi dalam membangun strategi komunikasi yang efektif guna menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, BPIP berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam membumikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

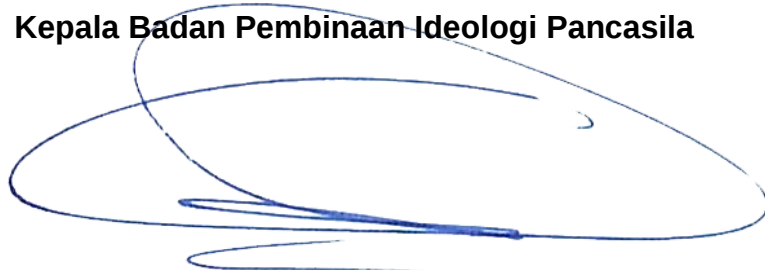
Secara dimensi struktural, Pancasila hadir dalam penyelenggaraan ketatanegaraan oleh Kementerian/Lembaga. Hal ini selaras dengan kedudukan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan dan ideologi politik negara. Pada dimensi kultural, Pancasila hadir dalam kehidupan warga/masyarakat, di mana hal ini selaras dengan kedudukan Pancasila

sebagai pandangan hidup yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi suatu tolok ukur refleksi bagaimana masyarakat memahami, mempedomani, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan semangat dan aksi nyata nilai-nilai Pancasila di berbagai sendi kehidupan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, menjadi refleksi atas kinerja BPIP selama tahun 2024, serta menjadi bahan evaluasi dan motivasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas peran BPIP di masa mendatang.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Prof. K.H. Drs. Yudian wahyudi, M.A., Ph.D.

RINGKASAN EKSEKUTIF

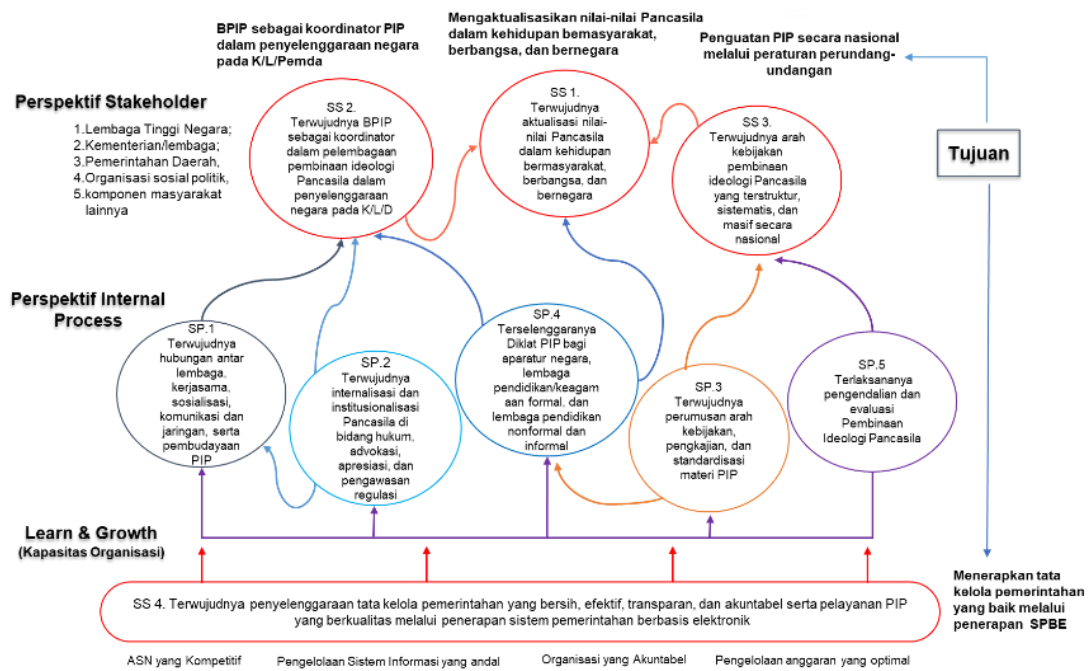
Arah kebijakan dan strategi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter dengan Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

BPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Presiden yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Program PIP oleh BPIP menghasilkan *output*, *outcome*, dan *impact* dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara dan teraktualisasikan dalam setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Strategi PIP diarahkan mewujudkan 4 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/Daerah;
3. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hubungan sasaran strategis dan dukungan program PIP dapat dipetakan, sebagai berikut:



PETA STRATEGIS BPIP

Ukuran keberhasilan sasaran strategis pertama, yaitu terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tahun 2024 adalah hasil penghitungan Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila yang bertujuan mengukur capaian pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disusun atas lima dimensi dan 23 indikator. Setiap dimensi mencerminkan capaian pengamalan nilai-nilai setiap Sila pada Pancasila, yang diterapkan di tengah masyarakat. Setiap indikator dipilih berdasarkan kajian konsepsi dan rujukan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra BPIP 2020-2024, ketersediaan data di BPS, serta uji publik dengan para ahli. Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2024 Nilai IAP mendapat nilai sebesar 77,73, di mana terjadi kenaikan nilai dari 75,53 pada hasil pengukuran IAP tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan peningkatan pengamalan dan perwujudan nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keterwakilan, serta gotong royong ekonomi.

Capaian sasaran strategis kedua adalah BPIP menjadi Koordinator dalam pelebagaan PIP yang merupakan salah satu kunci dalam gotong

royong membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di bumi nusantara untuk menguatkan kembali ketahanan sosial politik, ekonomi, budaya. Target kinerja terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Daerah tahun 2024 adalah 100% (120 K/L/Daerah). Tahun 2024 tercapai 120 K/L/Daerah. Upaya BPIP menjadi koordinator dalam institusionalisasi PIP dapat dirasakan melalui adanya tindaklanjut hasil kesepahaman menjadi kerjasama PIP. Faktor pendukung implementasi institusionalisasi PIP tahun 2024 adalah keberhasilan hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, jaringan, pembudayaan, hukum, pengawasan regulasi, advokasi, dan apresiasi.

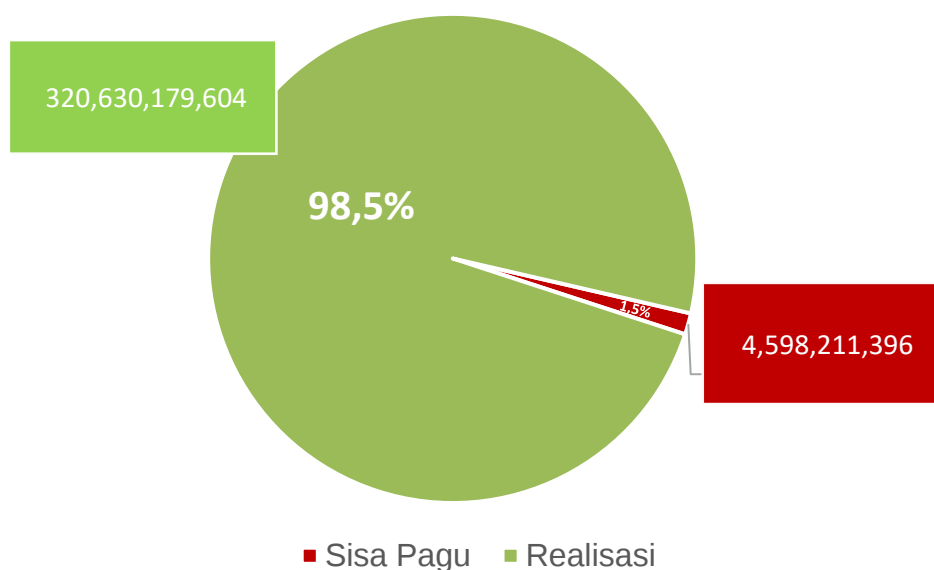
Capaian sasaran strategis ketiga adalah terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional. BPIP sebagai salah satu lembaga yang ditugasi untuk mewujudkan hal tersebut berupaya menghasilkan arah kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan massif dalam PIP secara Nasional. Ukuran kinerja terwujudnya arah kebijakan PIP adalah rekomendasi substansi atau rekomendasi kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Tahun 2024 indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional adalah 5 rekomendasi, yaitu: (i) Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029; (ii) Hasil Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (iii) Hasil Sertifikasi Pengajar/Penceramah Pembinaan Ideologi Pancasila; (iv) Hasil Kajian Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila; dan (v) Tempat Pemusatan Diklat Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah upaya memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi, efektivitas kinerja kelembagaan baik secara kinerja organisasi dan kinerja keuangan, maupun dalam kerangka pengawasan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Ukuran keberhasilan sasaran strategis ini tergambar dari capaian, yaitu: (i) Nilai Reformasi Birokrasi dari

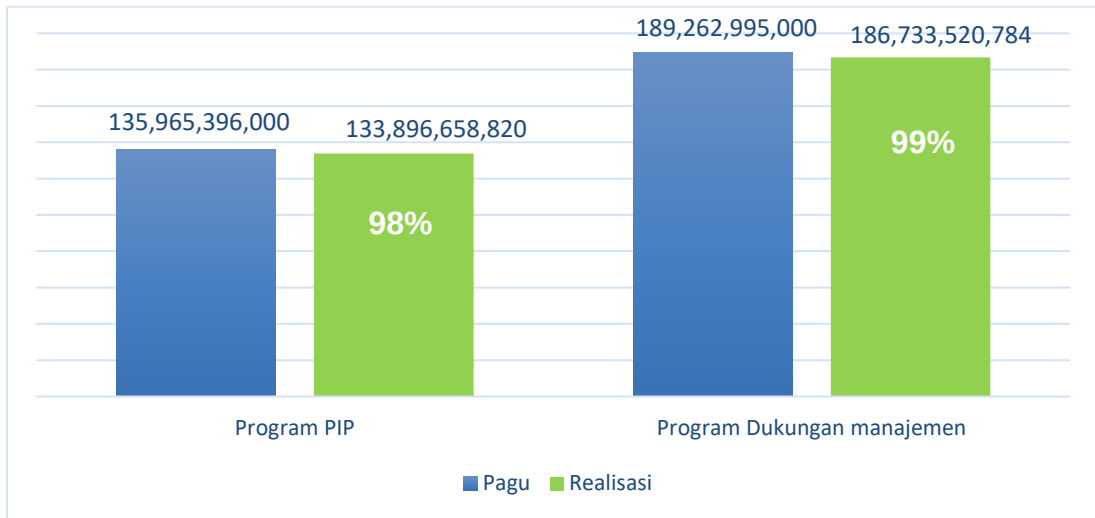
target 83, mendapat nilai sebesar 66,82; (ii) Indeks sistem merit dari target sebesar 0,81, mendapat nilai sebesar 0,83; (iii) Opini Laporan Keuangan oleh BPK mendapatkan opini WTP; (iv) Nilai SAKIP dari target predikat BB, mendapatkan predikat B; (v) Nilai Profesionalisme ASN dari target sebesar 83, mendapatkan nilai sebesar 69,45; dan (vi) Indeks Kepuasan Masyarakat dari target 90%, mendapatkan nilai sebesar 90,25%.

Dari sisi kinerja anggaran menunjukkan hasil memuaskan. Hingga akhir periode Tahun 2024, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024 realisasi anggaran BPIP adalah 98,5% atau sebesar Rp320.630.179.604,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2024 sebesar Rp325.228.391.000,00. Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode Tahun 2023:

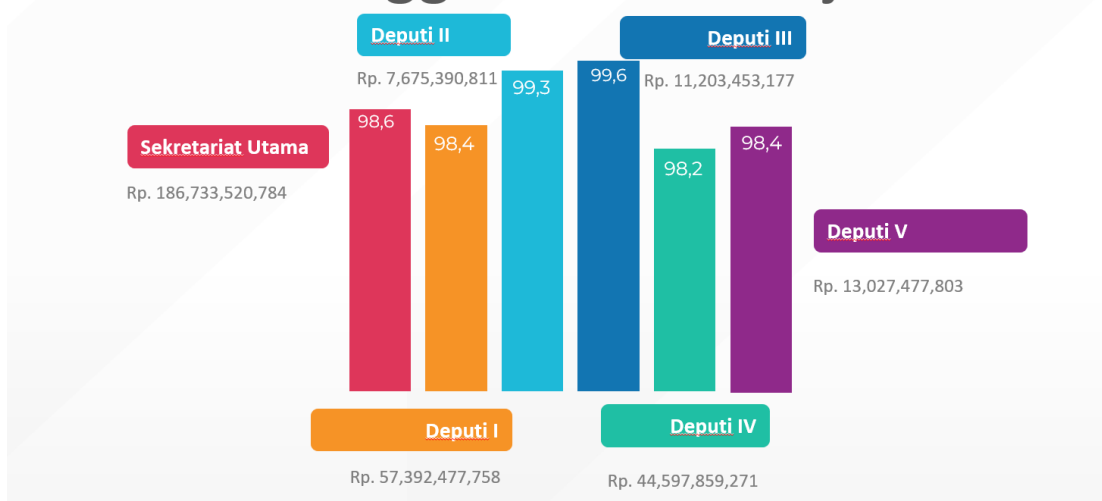
Realisasi Anggaran BPIP Tahun 2024



Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024



Realisasi Anggaran Unit Kerja 2024





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai Dasar Negara (*Philosophischegrondslaag*) sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus terus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan para pendiri bangsa tersebut pada dasarnya merupakan kompromi dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia mengandung maksud bahwa setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan Dasar hidup untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara guna meraih tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan PIP melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Peran tersebut melekat pada BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

BPIP sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja BPIP Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPIP atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Presiden. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPIP, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja BPIP.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 1. 1 Rapat Kerja BPIP Tahun 2024

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, kedudukan, tugas, fungsi, dan pemangku kepentingan BPIP adalah sebagai berikut :

I. Kedudukan

BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia

II. Tugas

merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi Diklat, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

III. Fungsi

1. perumusan arah kebijakan PIP;
2. penyusunan peta jalan PIP;
3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP;
4. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP;
5. pengaturan PIP;

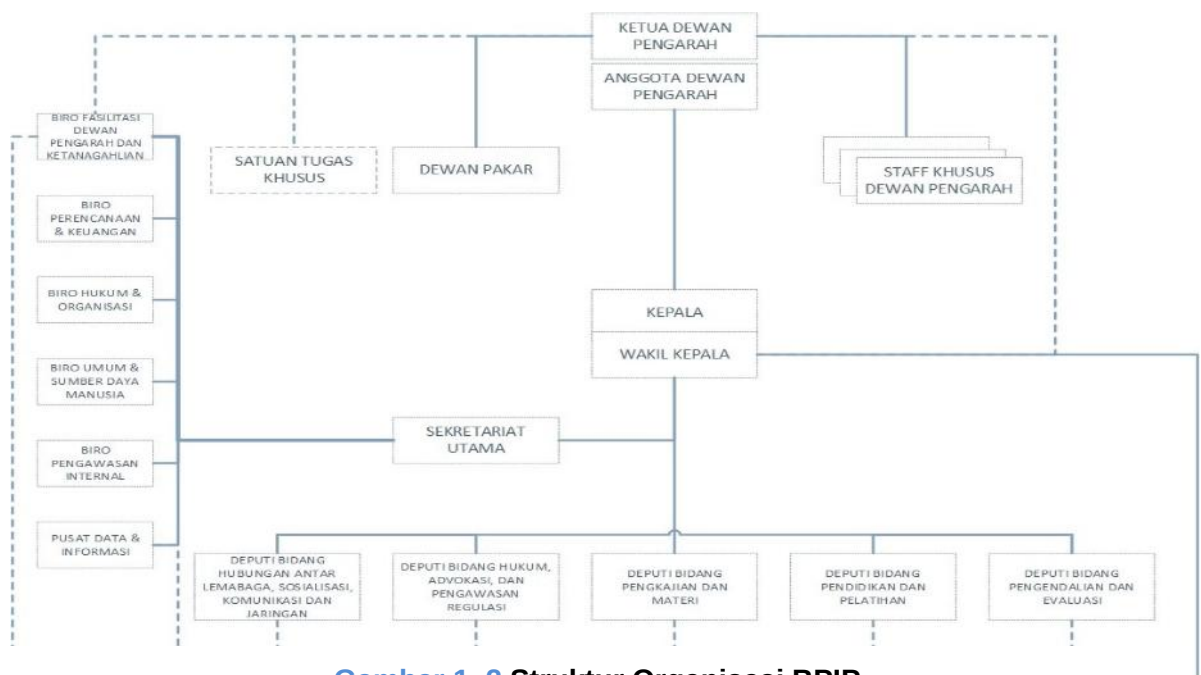
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP;
7. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP;
8. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
9. advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
10. penyusunan standardisasi Diklat Pancasila serta menyelenggarakan Diklat; dan
11. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

IV. Pemangku Kepentingan

- a) Lembaga Tinggi Negara; b) Kementerian/Lembaga; c) Pemerintahan Daerah; d) Organisasi Sosial Politik; dan e) Komponen Masyarakat Lainnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPIP nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPIP

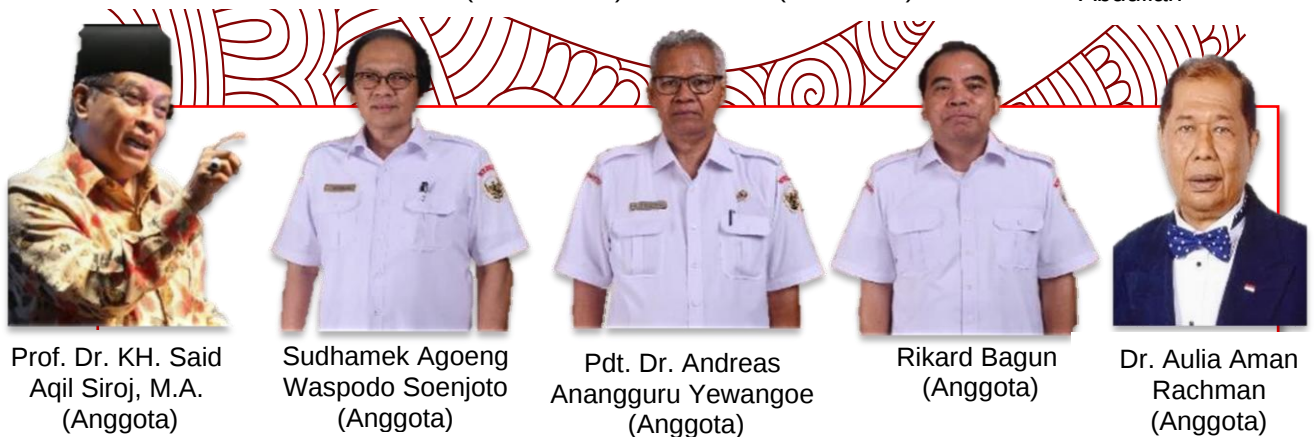
Pancasila, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP nomor 3 Tahun 2023 , adalah sebagai berikut :

Sebaran sumber daya manusia pada unit organisasi di lingkungan BPIP adalah sebagai berikut:

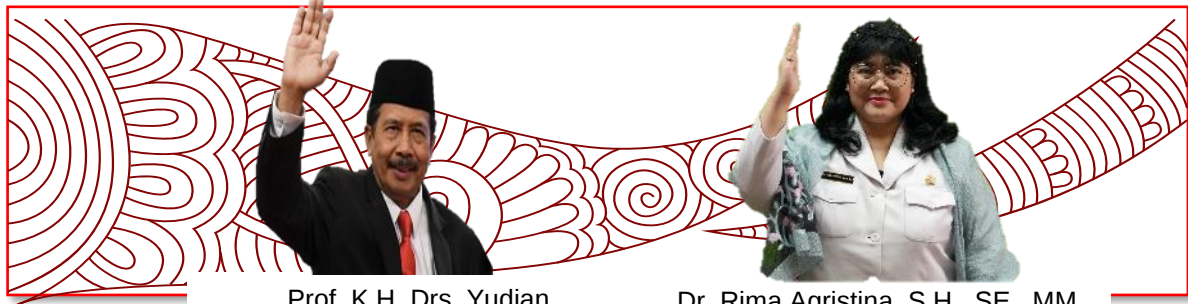
Tabel 1. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia BPIP

No	Unit Kerja	Jumlah														Total
		Kepala Waka	JPT Madya	Staf khusus	Dewan Pakar	JF Utama	JPT Pratama	Administrator	JF Madya	Pengawas	JF Muda	Pelaksana	JF Pertama	JF Trampil	PTT	
1	Kepala Dan Wakil Kepala	2														2
2	Staf Khusus			1												1
3	Dewan Pakar				3											3
4	Sekretariat Utama		1			0	6	7	6	26	8	48	47	5	86	240
5	Deputi I		1				3		4			6	9	2	17	42
6	Deputi II		0				3		6			10	9	4	5	37
7	Deputi III		1				2		8			22	11	0	1	45
8	Deputi IV		0				3		8			16	12	4	2	45
9	Deputi V		1				3		5			7	6	2	8	32
	Jumlah	2	4	1	3	0	20	7	37	26	8	109	94	17	119	447

Dewan Pengarah BPIP:



Kepala dan Wakil Kepala BPIP:



Prof. K.H. Drs. Yudian
Wahyudi, M.A. Ph.D. (Kepala)

Dr. Rima Agristina, S.H., SE., MM.
(Wakil Kepala)

Unit Eselon I:



Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.

Sekretaris Utama & Plt. Deputy
Bidang Hukum, Advokasi, dan
Pengawasan Regulasi



Ir. Prakoso, M.M

Deputy Bidang Hubungan
Antar Lembaga, Sosialisasi,
Komunikasi dan Jaringan



Surahno, S.H., M.Hum

Deputy Bidang Pengkajian dan
Materi & Plt. Deputy Bidang
Pendidikan dan Pelatihan



Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.

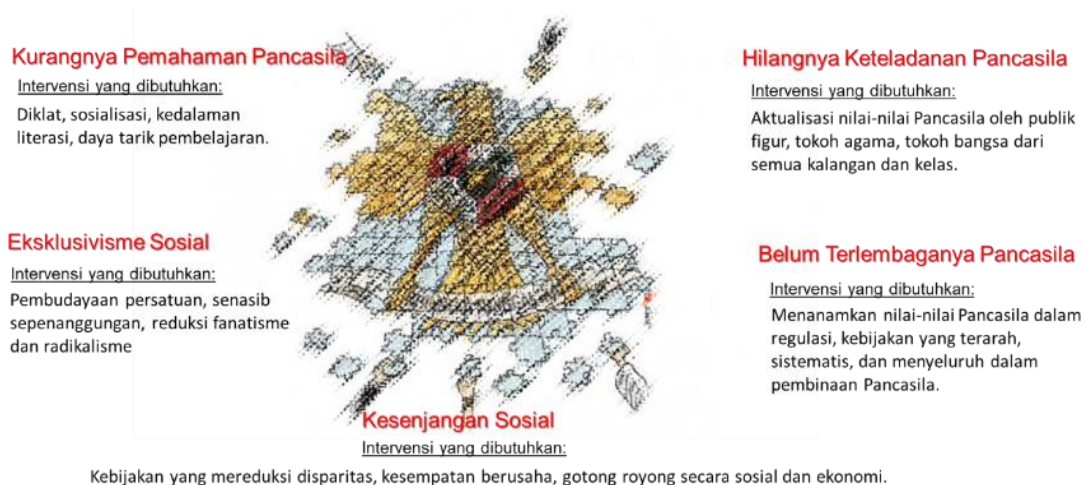
Deputy Bidang Pengendalian
dan Evaluasi

D. Aspek Strategis

Aspek strategis BPIP adalah bahwa PIP menjadi Prioritas Nasional dengan arah kebijakan dan strategi PIP dalam RPJMN 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter dengan Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Cakupan kebijakan dan strategi BPIP, yaitu:

- (a) PIP, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;
- (b) peningkatan peran dan fungsi BPPI sebagai perumus kebijakan umum PIP;
- (c) harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan
- (d) membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara.

E. Isu Strategis



Gambar 1. 3 Isu Strategis BPPI

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni: ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, maka gatra yang paling rawan adalah gatra ideologi. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan ketahanan ideologi, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman Pancasila;
2. Terjadinya eksklusivisme sosial;
3. Masih tingginya kesenjangan sosial;
4. Belum terlembaganya Pancasila; dan
5. Belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila,

Tugas BPIP memang tidak mudah di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja. Kehadiran BPIP merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha PIP secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja BPIP Tahun 2024 terdiri dari 4 (Empat) bab. Bab I pendahuluan menjelaskan antara lain: latar belakang eksistensi Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar berdirinya BPIP. Selanjutnya adalah kedudukan, tugas pokok, dan fungsi BPIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Bab II adalah potret rencana kerja BPIP TA 2024. Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 menetapkan arah kebijakan, informasi kinerja sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan PIP yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang secara sistematis diukur dan dikelola. Bab III capaian strategis Tahun 2024 akan menjelaskan capaian-capaian BPIP selama Tahun 2024. Capaian yang dijelaskan meliputi capaian sasaran dan indikator kinerja utama strategis. Skema penjelasan capaian strategis pada bab ini adalah setiap sasaran strategis didukung oleh sasaran program beserta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sasaran program tersebut dan juga kinerja anggaran menjelaskan perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran. Bab IV Sebagai Penutup Laporan.



AMANAT PRESIDEN RI PADA UPACARA HARI LAHIR PANCASILA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II | Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024 atau disebut Renstra BPIP adalah dokumen perencanaan BPIP untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) BPIP Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra BPIP Tahun 2020- 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020.



Gambar 2. 1 RPJMN 2020-2024 Terkait PIP

Pancasila sebagai Dasar Negara (*Philosophischegrondslaag*) sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus terus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan para pendiri bangsa tersebut pada dasarnya merupakan kompromi dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia mengandung maksud bahwa setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan Dasar hidup untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara guna meraih tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. BPIP bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait menyusun arah kebijakan dan strategi PIP. Langkah maju ini perlu diikuti dengan pembinaan dan aktualisasi Pancasila bagi seluruh warga negara mulai dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Rencana Strategis BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategis eksternal. Rencana strategis

BPIP 2020-2024 dituangkan dalam Peraturan BPIP nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPIP adalah sebagai berikut:

VISI:

BPIP yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden di bidang PIP untuk mewujudkan visi dan misi Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandasan Gotong Royong”.

MISI :

BPIP mewujudkan misi Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi PIP sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, untuk menjabarkan visi dan misi tersebut, BPIP telah menetapkan 4 (empat) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut mencerminkan *outcome* BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan BPIP. Tujuan, Sasaran, Ukuran Keberhasilan BPIP pada Renstra BPIP disajikan pada gambar sebagai berikut:

01 TUJUAN 1 Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	SASARAN : Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara INDIKATOR : Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) TARGET 2024: 77
--	--



Gambar 2. 2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPIP Tahun 2020-2024

B. Rencana Kerja

Total Alokasi pagu DIPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp325.228.391.000. (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Anggaran diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan 2 program, yaitu :

- Program PIP, sebesar Rp135.965.396.000,-; dan
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya, sebesar Rp 189.262.995.000,-.

Rincian rencana kerja kedua program tersebut adalah :

Tabel 2. 1 Rincian Rencana Kerja Tahun 2024

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
Program PIP		135.965.396.000
1.	Penguatan Sinergi Antar Lembaga yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi	6.479.038.000
2.	Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi Ideologi Pancasila	35.344.153.000
3.	Penyelenggaraan Pengembangan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	16.500.000.000
4.	Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila	3.375.000.000
5.	Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	2.702.000.000
6.	Pelaksanaan Pelembagaan dan Rekomendasi	1.650.000.000
7.	Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4.350.000.000
8.	Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	3.450.000.000
9.	Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3.450.000.000
10.	Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan, Standardisasi Kurikulum dan Kerjasama Diklat PIP	6.847.676.000
11.	Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	26.295.619.000
12.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP	12.282.280.000
13.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	3.356.512.000

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
14.	Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3.127.338.000
15.	Pelaksanaan Pengukuran Pelebagaan Pancasila	6.755.780.000
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya		189,262,995,000
1.	Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	9.851.071.000
2.	Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal	2.400.000.000
3.	Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan	133.673.924.000
4.	Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	31.350.000.000
5.	Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi	8.250.000.000
6.	Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi	3.738.000.000
Jumlah		325.228.391.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BPPIP menetapkan 4 sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPPIP yaitu: melaksanakan mandat merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi Diklat, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sasaran strategis BPPIP mendukung Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Perjanjian kinerja yang ditetapkan tahun 2024 berisi langkah-langkah strategis tahunan dari lima tahun strategi dalam rencana strategis Tahun

2020-2024. Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Target
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Nilai indeks Aktualisasi Pancasila	77
Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	100%
Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis dan masif secara nasional	Rekomendasi arah kebijakan yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	83
	Indeks Sistem Merit	0,81
	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
	Nilai SAKIP	BB
	Nilai Profesionalisme ASN	83
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%

D. Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja

Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantuan evaluasi, analisis, dan pelaporan akuntabilitas kinerja. Pengelolaan kinerja yang disusun berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di koordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan acuan ukuran kinerja.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di lingkungan BPIP, ruang lingkup Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi pengumpulan data kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja, pengukuran data kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring dan evaluasi. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja pada tingkat



Gambar 2. 3 Rapat Pleno Bulanan

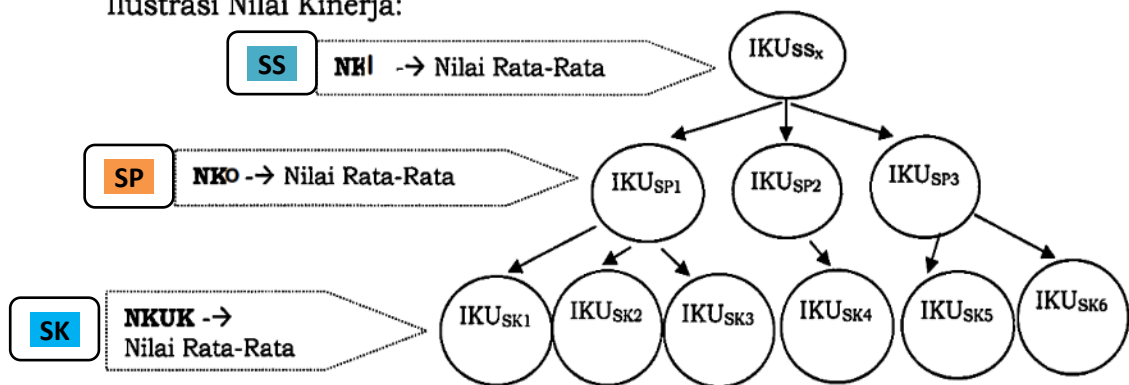
Badan, Unit Organisasi, dan Unit Kerja melakukan koordinasi pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengumpulan dan penyampaian laporan data kinerja pada masing-masing tingkatan dan unit kerja dikoordinasikan oleh : (i) KPIs Manager tingkat BPIP; (ii) KPIs Manager tingkat Organisasi (eselon I); dan (iii) Koordinator Capaian IKU pada tingkat Unit Kerja (eselon II). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan; dan/atau
2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis.

3. Penilaian kinerja dilakukan secara berjenjang sesuai dengan cascading indikator kinerja, yaitu:

- Nilai Kinerja Unit Kinerja (NKUK) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon II.
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon I.
- Nilai Kinerja Instansi (NKI) rerata nilai kinerja dari indikator kinerja BPIP.

Ilustrasi Nilai Kinerja:



Gambar 2. 4 Ilustrasi Penilaian Kinerja

Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP, antara lain adalah:

Tabel 2. 3 Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP

Warna	Hijau	Kuning	Merah
Capaian	$n \geq 100$	$80 \leq n < 100$	$n < 80$
Interpretasi	Baik	Cukup	Kurang

Aplikasi pendukung pengelolaan kinerja BPIP:



Hasil monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan rencana aksi perjanjian kinerja dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan. Laporan Kinerja Triwulanan tahun 2024 seperti berikut:



Gambar 2. 5 Laporan Triwulanan Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



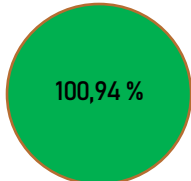
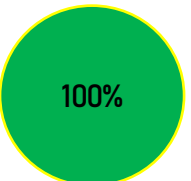
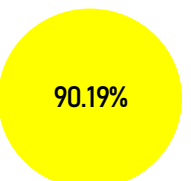
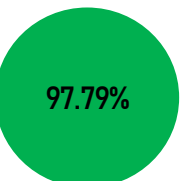
PELAKSANAAN UPACARA HARI LAHIR PANCASILA DI DUMAI

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPIP tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan rerata nilai kinerja dari IKU BPIP maka diperoleh data Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP adalah sebesar 97,79%. Kinerja BPIP sampai dengan Desember 2024 mencapai kategori baik. Capaian kinerja BPIP tahun 2024 ditunjukkan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Instansi (NKI) 2024

 IKU_{SS1} Nilai IAP	 IKU_{SS2} Persentase Institusionalisasi PIP	 IKU_{SS3} Rekomendasi kepada Presiden	 IKU_{SS4} Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	 Nilai Kinerja Instansi (NKI)
---	---	---	---	--

Nilai Kinerja Instansi (NKI) tahun 2024 adalah sebesar 97,79 % secara keseluruhan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Laporan Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP Tahun 2024

KODE	SASARAN STRATEGIS (SS)/ INDEKS KINERJA UTAMA (IKU)	IKU			BOBOT	INDEKS CAPAIAN IKU
		Target	Realisasi	Capaian		
SS.1	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara				25%	25,23%
IKU.1	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	77	77.73	100,94%	25%	25,23%
SS.2	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda				25%	25%
IKU.2	Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	100% (120 K/L)	100% (120 K/L)	100%	25%	25%
SS.3	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional				25%	25%
IKU.3	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 Rek	5 Rek	100%	25%	25%
SS.4	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik				25%	22,56%
IKU.4.1	Nilai Reformasi Birokrasi	83	66,82	81%	4,17%	3,38%
IKU.4.2	Indeks Sistem Merit	0.81	0.83	102%	4,17%	4,25%
IKU.4.3	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100%	4,17%	4,17%
IKU.4.4	Nilai SAKIP	BB	B	80%	4,17%	3,33%
IKU.4.5	Nilai Profesionalisme ASN	83	69,45	77,89%	4,17%	3,25%
IKU.4.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	90.25%	100,27%	4,17%	4,18%
NILAI KINERJA INSTANSI						97,79%

Adapun analisis capaian kinerja utama BPIP tahun 2024 yang diuraikan berdasarkan sasaran dan perhitungan indikatornya, adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Ukuran keberhasilan Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tahun 2024 adalah:

Tabel 3.4 IKU Capaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	77	77.73

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan

melemahnya ideologi Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ruh bangsa ini untuk tetap bersatu dalam perbedaan dan keragaman terganggu dengan berkembangnya aspirasi ideologi politik transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Untuk itu, pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan.

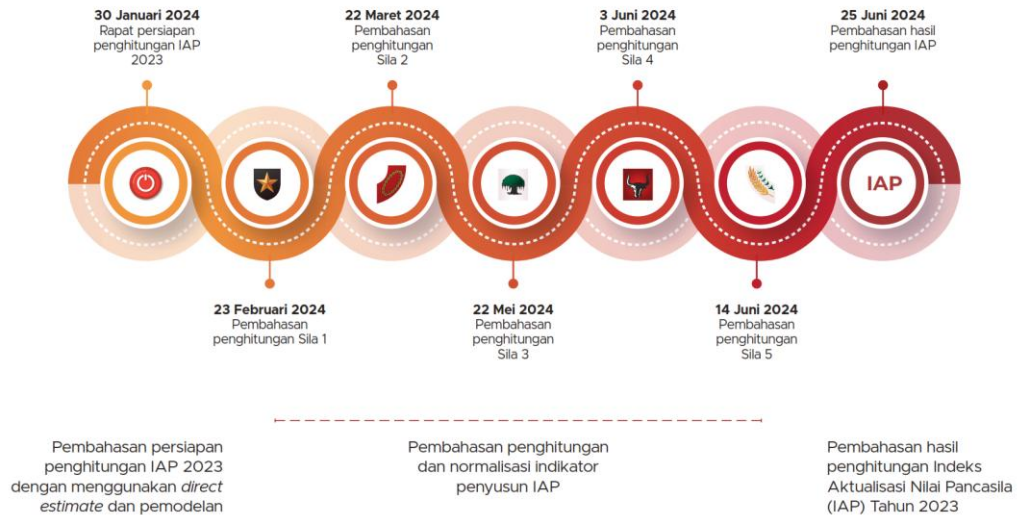
Sesuai dengan amanat dalam RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan dalam Prioritas Nasional (PN) 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, terdapat Program Prioritas (PP) pertama yaitu Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya program ini diturunkan menjadi Kegiatan Prioritas (KP), yaitu Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan, Kewargaan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Adapun indikator dan target yang ditetapkan yaitu melalui Indeks Aktualisasi Pancasila atau IAP.

Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai situasi dan kondisi terkini pengamalan (laku hidup, habituasi) Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan tersebut akan dilihat dari aspek realisasi nilai dan persepsi yang akan dibuat dalam bentuk indeks. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kerangka konsep IAP akan secara operasional didefinisikan sebagai: Ideologi yang nilai-nilai-nya aktual pada 3 lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) rumah-tangga/komunitas/hubungan antar warga, (2) kelembagaan negara (hubungan antar kelembagaan negara), dan (3) regulasi/kebijakan.

Indikator penyusun IAP dipetakan dengan mengacu pada kelima sila dalam Pancasila, yaitu: Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa; Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Sila 3: Persatuan Indonesia; Sila 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. BPS bersama dengan BPPI telah memetakan indikator-indikator penyusun yang secara substantif dapat mewakili kelima sila tersebut. Pemetaan indikator dilakukan berdasarkan ketersediaan data dan tinjauan

literatur. Ketersediaan data yang dimaksud adalah data tersedia di seluruh provinsi dan secara berkelanjutan.

MILESTONE KEGIATAN PENGHITUNGAN IAP 2023



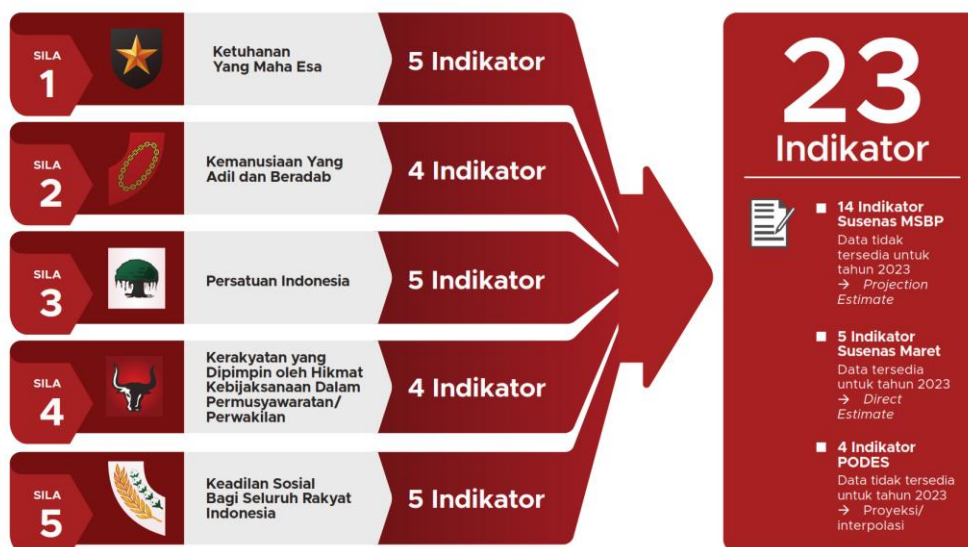
Gambar 3. 1 Milestone Kegiatan Penghitungan IAP 2023

Secara garis besar, proses penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) terdiri dari: pemetaan indikator kandidat penyusun IAP, proses seleksi indikator, penyiapan data, normalisasi indikator, penentuan bobot tiap sila, penghitungan indeks per sila, dan penghitungan IAP.



Gambar 3. 2 Proses Perhitungan IAP

INDIKATOR PENYUSUN IAP 2023



Gambar 3. 3 Indikator Penyusun IAP

Penghitungan IAP bertujuan untuk mengukur capaian pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, disusun atas lima dimensi dan 23 indikator. Setiap dimensi mencerminkan capaian pengamalan nilai-nilai setiap Sila pada Pancasila, yang diterapkan di tengah masyarakat. Setiap indikator dipilih berdasarkan kajian konsepsi dan rujukan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra BPIP 2020-2024, ketersediaan data di BPS, serta uji publik dengan para ahli. Berikut akan dijelaskan hasil penghitungan capaian aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Indonesia. Penghitungan IAP dimulai dengan menghitung nilai indeks Sila menggunakan indikator yang sudah dinormalisasi. Indeks Sila dihitung dengan bobot indikator yang sama (*equal weight*) untuk setiap indikator dalam Sila yang sama. Persamaan yang digunakan untuk memperoleh indeks Sila IAP adalah sebagai berikut:

PENENTUAN BOBOT TIAP SILA IAP 2023



Gambar 3. 4 Indikator Penyusun IAP

IAP dihitung pertama kalinya tahun 2018. Bila dibandingkan dengan IAP 2018, penghitungan IAP 2021 mengalami penyempurnaan pada indikator penyusunnya. Proses penyempurnaan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya tambahan ketersediaan data yang dianggap lebih relevan untuk menggambarkan capaian setiap sila. Proses penyempurnaan dilakukan melalui identifikasi ulang indikator penyusun setiap sila yang dilakukan secara bersama-sama antara BPS dan BPPI serta tim ahli. Pemetaan indikator dilakukan berdasarkan informasi program aktualisasi Pancasila dan tim ahli dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang berkesinambungan di seluruh provinsi. Penghitungan IAP tahun 2023 menggunakan indikator yang sama seperti penghitungan IAP tahun 2021.

Idealnya IAP dihitung menggunakan sumber data yang dirancang khusus untuk mengukur capaian aktualisasi Pancasila. Namun, karena belum adanya survei khusus yang mengukur capaian aktualisasi Pancasila, maka IAP diukur dengan menggunakan data-data hasil survei atau pendataan yang telah tersedia datanya dan secara substantif dapat dijadikan sebagai proksi indikator yang dapat menjelaskan sila yang mencakup: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sumber data yang digunakan untuk penyusunan IAP tahun 2023 mencakup data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) baik KOR maupun Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dan Pendataan Potensi Desa (Podes).

Nilai IAP tahun 2024 adalah hasil dari survei aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan sepanjang tahun 2023. Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2024, Nilai IAP tahun 2023 sebesar **77,73** mengalami peningkatan sebesar 2,2 poin dibandingkan capaian IAP tahun 2022 yaitu sebesar 75,53. Jika dilihat dari capaian tahun 2018 sebesar 73,07, telah menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,66 poin pada periode 2018–2023. Peningkatan angka tersebut dapat dimaknai sebagai perbaikan perwujudan aktualisasi Pancasila baik itu di masyarakat maupun penyelenggaraan negara.

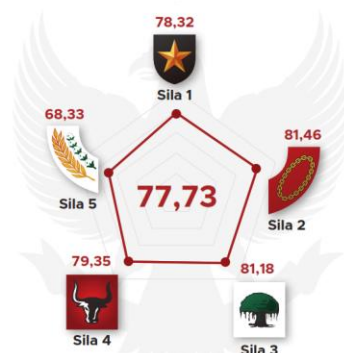
CAPAIAN IAP NASIONAL 2021–2023

Tren Capaian IAP 2021-2023



Sila	2022	2023	Delta
1 Ketuhanan Yang Maha Esa	76,06	78,32	2,26
2 kemanusiaan yang Adil dan Beradab	81,32	81,46	0,14
3 Persatuan Indonesia	78,80	81,18	2,38
4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	74,47	79,35	4,88
5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	66,98	68,33	1,35

Indeks Sila Penyusun IAP 2023



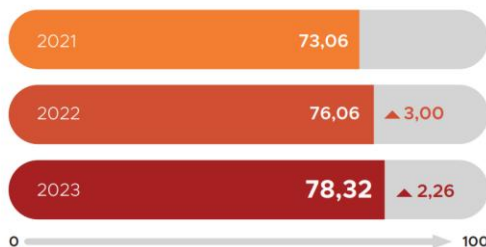
- Capaian IAP mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun tidak sebesar kenaikan pada tahun 2022. Kontribusi kenaikan paling besar adalah Sila 4 (naik 4,88 poin).
- Semua Sila penyusun IAP mengalami kemajuan pada tahun 2023. Walaupun demikian, Sila 5 yang memiliki capaian paling rendah dibanding sila lainnya sebesar 68,33.
- Sila 2 merupakan Sila yang paling besar kontribusinya terhadap capaian IAP tahun 2023 (81,46).

Gambar 3.5 Perbandingan Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2022-2023

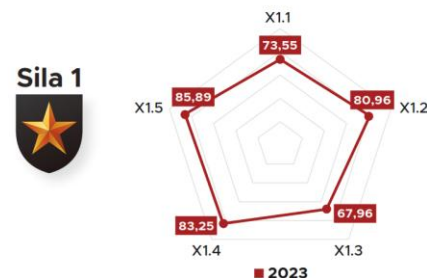
Meskipun capaian berdasarkan dimensi sila sudah cukup baik, namun jika dilihat lebih dalam menurut indikator, masih terdapat tantangan yang perlu ditingkatkan lagi dari setiap dimensi. Indikator yang perlu ditingkatkan pada Sila Pertama yaitu indikator persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan kepercayaan lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tantangan pada Sila Kedua yaitu persentase rumah tangga yang setuju adanya aturan tertulis yang mengatur kesetaraan dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya. Sementara itu indikator yang perlu penguatan dalam Sila Ketiga yaitu persentase rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Tantangan pada Sila Keempat yaitu persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah. Sedangkan tantangan pada indikator pada Sila Kelima yaitu persentase desa dengan produk unggulan pangan.

PERKEMBANGAN CAPAIAN SILA 1 (NASIONAL)

Tren Capaian Sila 1



Indikator Penyusun (Normalisasi)



Sila	2022	2023	Delta	Target
X1.1 Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan keagamaan dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekitar tempat tinggal dalam tiga bulan terakhir	54.43	55.16	0.74	75
X1.2 Persentase rumah tangga yang setuju adanya aturan tertulis yang melindungi kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama dan kepercayaannya	58.73	60.72	1.99	75
X1.3 Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan kepercayaan lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	57.40	61.17	3.76	90
X1.4 Persentase rumah tangga yang pernah mengalami pembatasan, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan terkait dengan ajaran agama dan Kepercayaan	1.82	1.67	-0.14	10
X1.5 Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama	79.66	81.59	1.93	95

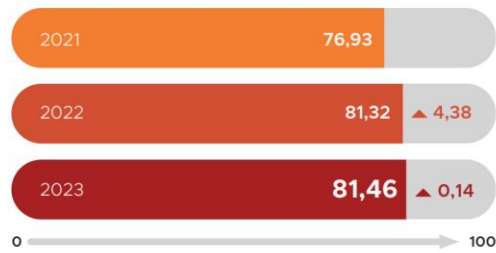


- Capaian IAP Sila 1 mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun tidak sebesar kenaikan pada tahun 2022. Kontribusi kenaikan paling besar adalah indikator X13 (naik 3,76 persen poin).
- Semua indikator penyusun Sila 1 mengalami kemajuan pada tahun 2023. Walaupun demikian, masih diperlukan intervensi untuk setiap indikator agar dapat mencapai target.
- Indikator X15 merupakan indikator yang paling besar kontribusinya terhadap capaian IAP Sila 1 pada tahun 2023 (skor normalisasi paling besar → 85,89).

Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian Sila 2

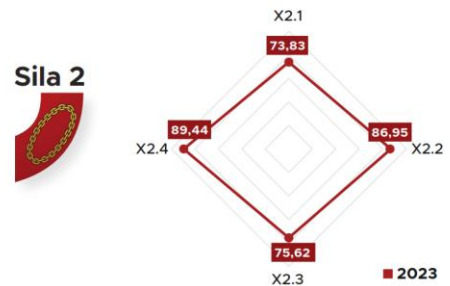
PERKEMBANGAN CAPAIAN SILA 2 (NASIONAL)

Tren Capaian Sila 2



Sila	2022	2023	Delta	Target
X2.1 Persentase rumah tangga yang setuju adanya aturan tertulis yang mengatur kesetaraan dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya	53,52	55,38	1,85	75
X2.2 Persentase rumah tangga yang pernah mengalami diskriminasi dalam hal gender, etnis dan kelompok rentan lainnya	1,38	1,30	-0,08	0
X2.3 Rasio APS penduduk usia 7-18 tahun yang menyandang disabilitas terhadap non-disabilitas	77,09	75,62	-1,46	100
X2.4 Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya	0,47	0,53	0,06	0
X15 Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama	79,66	81,59	1,93	95

Indikator Penyusun (Normalisasi)

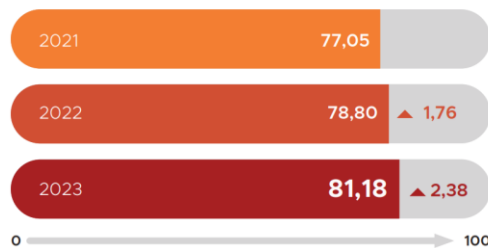


- Capaian IAP Sila 2 mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun tidak sebesar kenaikan pada tahun 2022. Kontribusi kenaikan paling besar adalah indikator X2.1 (naik 1,85 persen poin).
- 3 dari 4 indikator penyusun Sila 2 mengalami kemajuan pada tahun 2023. Indikator X2.3 mengalami penurunan.
- Indikator X2.4 merupakan indikator yang paling besar kontribusinya terhadap capaian IAP Sila 2 pada tahun 2023 (skor normalisasi paling besar → 89,44).

Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian Sila 2

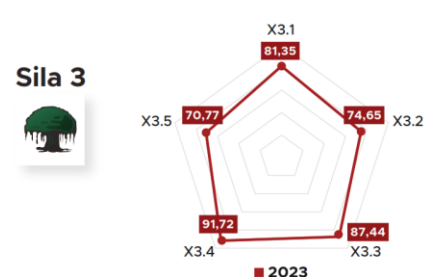
PERKEMBANGAN CAPAIAN SILA 3 (NASIONAL)

Tren Capaian Sila 3



Sila	2022	2023	Delta	Target
X3.1 Persentase rumah tangga yang mengibarkan/ memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dalam 1 tahun terakhir	77,82	81,35	3,53	100
X3.2 Persentase rumah tangga yang setuju jika dipimpin oleh pemimpin (ketua/kepala) yang berbeda suku, bangsa, dan/atau berbeda agama atau kepercayaan	64,41	67,19	2,77	90
X3.3 Persentase Rumah tangga yang pernah menyelenggarakan atau menghadiri Upacara adat/ tradisi dalam 1 Tahun terakhir	77,43	78,7	1,26	90
X3.4 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	91,04	91,72	0,67	100
X3.5 Persentase Rumah Tangga melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	40,53	42,46	1,93	60

Indikator Penyusun (Normalisasi)

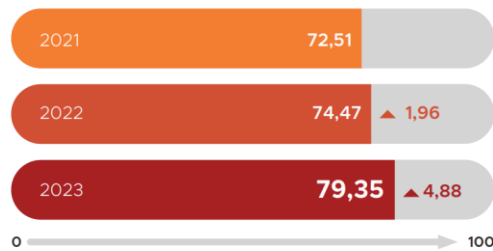


- Capaian IAP Sila 3 mengalami kenaikan pada tahun 2023, dengan kenaikan yang lebih besar dibandingkan kemajuan pada tahun 2022. Kontribusi kenaikan paling besar adalah indikator X3.1 (naik 3,53 persen poin).
- Semua indikator penyusun Sila 3 mengalami kemajuan pada tahun 2023. Walaupun demikian, masih diperlukan intervensi untuk setiap indikator agar dapat mencapai target.
- Indikator X3.4 merupakan indikator yang paling besar kontribusinya terhadap capaian IAP Sila 3 pada tahun 2023 (skor normalisasi paling besar → 91,72).

Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian Sila 3

PERKEMBANGAN CAPAIAN SILA 4 (NASIONAL)

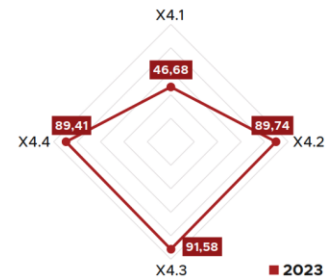
Tren Capaian Sila 4



Sila	2022	2023	Delta	Target
X4.1	6,72	9,34	2,61	20
X4.2	77,31	80,77	3,46	90
X4.3	85,02	87	1,98	95
X4.4	88,89	89,41	0,53	100

Indikator Penyusun (Normalisasi)

Sila 4

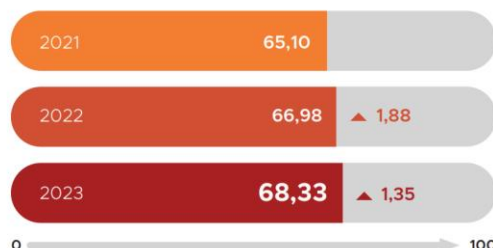


- Capaian IAP Sila 4 mengalami kenaikan pada tahun 2023, dengan kenaikan yang lebih besar dibandingkan kemajuan pada tahun 2022. Kontribusi kenaikan paling besar adalah indikator X4.2 (naik 3,46 persen poin).
- Semua indikator penyusun Sila 4 mengalami kemajuan pada tahun 2023. Walaupun demikian, masih diperlukan intervensi untuk setiap indikator agar dapat mencapai target.
- Indikator X4.3 merupakan indikator yang paling besar kontribusinya terhadap capaian IAP Sila 4 pada tahun 2023 (skor normalisasi paling besar → 91,58).

Gambar 3. 10 Perbandingan Capaian Sila 4

PERKEMBANGAN CAPAIAN SILA 5 (NASIONAL)

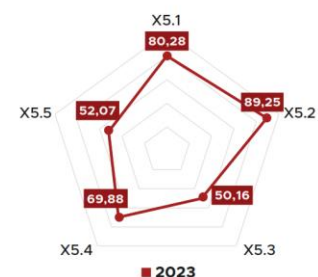
Tren Capaian Sila 5



Sila	2022	2023	Delta	Target
X5.1	79,63	80,28	0,65	100
X5.2	83,99	84,79	0,8	95
X5.3	29,09	30,1	1,01	60
X5.4	67,01	69,88	2,87	100
X5.5	20,55	20,83	0,28	40

Indikator Penyusun (Normalisasi)

Sila 5



- Capaian IAP Sila 5 mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun tidak sebesar kenaikan pada tahun 2022. Kontribusi kenaikan paling besar adalah indikator X5.4 (naik 2,87 persen poin).
- Semua indikator penyusun Sila 5 mengalami kemajuan pada tahun 2023. Walaupun demikian, masih diperlukan intervensi untuk setiap indikator agar dapat mencapai target.
- Indikator X5.2 merupakan indikator yang paling besar kontribusinya terhadap capaian IAP Sila 5 pada tahun 2023 (skor normalisasi paling besar → 89,25).

Gambar 3. 9 Perbandingan Capaian Sila 5

Meskipun hasil pengukuran aktualisasi Pancasila telah menunjukkan beberapa peningkatan capaian yang signifikan, namun apabila ditinjau lebih dalam berdasarkan indikatornya, masih terdapat kesenjangan antara skor yang telah dicapai dan target yang ditetapkan. Lebar gap antara skor

capaian dan target menunjukkan besarnya tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mencapai tujuan gerakan secara menyeluruh. Diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah melalui Kementerian/Lembaga pengampu tiap gerakan, serta peran dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan media untuk mendorong peningkatan nilai capaian aktualisasi Pancasila dari setiap sila secara simultan.

Salah satu intervensi langsung BPPI yang pada gilirannya dalam jangka waktu tertentu, baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi IAP dilakukan kegiatan-kegiatan strategis yaitu penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan PIP dengan jumlah peserta sebanyak 6.781 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan/ Daerah Pelaksanaan	Jumlah (orang)	Satuan
I.	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	6.781	orang
1.	Diklat Pengajar dan Penceramah Diklat PIP Tingkat Menengah dan Dasar Tahun 2024 pada tanggal 29 Januari s.d. 2 Februari 2024	94	orang
2.	Diklat Pengajar PIP Berbasis BTU Pendidikan Pancasila Bagi Guru SD, SMP, dan SMA di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 s.d. 27 Maret 2024	284	orang
3.	Diklat PIP Bagi Pengajar Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Bandung pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2024.	478	orang
4.	Pembelajaran Aktif Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Paskibraka Tingkat Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2024.	103	orang
5.	Diklat PIP Bagi Purnapaskibraka Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 Angkatan I, II, III pada tanggal 6 s.d. 22 November 2024.	5822	orang

Tabel 3. 5 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP

Diklat PIP merupakan Diklat yang menekankan pada pendidikan perubahan mental/sikap perilaku individu sehingga dapat memberikan teladan sosial di lingkungan sekitar. Penyampaian materi lebih bersifat interaktif dan *native* sehingga perlu adanya media tatap-muka langsung dan aktivitas lapangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, khususnya penyelenggaraan Diklat masih terdapat banyak sekali tantangan dan ruang

untuk pengembangan. Upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan lebih intensif, pemenuhan standar dan kurikulum pelaksanaan dan pendidikan PIP, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang terstandar, serta pemberian kewenangan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PIP, sehingga dalam Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan PIP memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman Pancasila, terjadinya inklusivisme sosial, pelebagaan Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila bagi seluruh anak bangsa, baik di dalam negeri maupun luar negeri.



Gambar 3. 11 Pelaksanaan Penyelenggaraan diklat PIP Calon Maheswara

b. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda

Menjadi Koordinator dalam Pelebagaan PIP merupakan salah satu kunci dalam membumikan kembali ideologi Pancasila di bumi nusantara untuk menguatkan ketahanan sosial politik, ekonomi, budaya. Ukuran keberhasilan terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda tahun 2024 adalah:

Tabel 3. 6 IKU Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	100 % (120 K/L/Komunitas)	100% (120 K/L/Komunitas)

Institusionalisasi adalah proses suatu norma yang dilewati oleh masyarakat untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan sehingga di kenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Sasarannya adalah K/L/Instansi Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Persentase diukur dari jumlah institusionalisasi yang berhasil, dibandingkan dengan seluruh berbagai upaya institusionalisasi yang dikoordinasikan oleh BPIP.

Berikut adalah kegiatan kerja sama yang sudah dilakukan, dituangkan dalam 2 tabel yang berbeda yaitu tabel tindak lanjut kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah, dan tabel tindak lanjut kerja sama dengan Orsospol, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga:

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Kemenkumham	Kajian dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Wilayah I	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang BPIP	
		Penyelarasan rancangan peraturan badan BPIP tentang analisis dan sinkronisasi, kajian dan rekomendasi	
		Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bangka Belitung	
		Strategi Implementasi Nilai Pancasila terhadap Peraturan Daerah di Semarang	
		Harmonisasi Peraturan PKPU	
		Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di NTT	
		Institusionalisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Manado	Deputi HALSKJ
		Internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila di tanjung pinang	
		Melakukan sosialisasi bersama dengan kepada warga binaan	
		Penguatan PIP bagi Petugas dan Warga Binaan Lapas II B Kayu Agung, sebagai bentuk Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham	
		Sosialisasi Penguatan PIP bagi Petugas Lapas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Nusakambangan	
		Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP bagi Purnapaskibraka.	
2.	Kemendagri	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Kajian dan Analisis Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila sudah berjalan	
		penentuan Indikator Pancasila bersama Direktorat Produk Hukum Kemendagri	
		Penandatanganan MoU dan PKS Diklat PIP	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Diskusi Belanja masalah Penyusunan Alat Ukur PIP di lingkungan ASN	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Rakor Pengendalian PIP bersama Bakesbangpol daerah Sumatera secara daring	
		Rakor Pengendalian PIP bersama Bakesbangpol daerah Jawa secara daring	
		Pelaksanaan koordinasi Gotong Royong Pembumian Pancasila bersama Badan	Deputi HALSKJ

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Kesbangpol 34 Provinsi di Indonesia, dan Talk Show Nasional.Is.Me Goes to Campus	
		Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pekan Hari Lahir Pancasila, sarasehan Nasional dalam bentuk webinar.	
		Melakukan kegiatan bersama dalam bentuk FGD terkait penyebarluasan Peraturan Kementerian dalam Negeri maupun BNPP dengan melibatkan semua unsur SKPD di daerah	
		"Pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih" Kegiatan kolaborasi dan gotong royong dalam rangka menyambut HUT RI ke-78	Deputi HALSKJ
		Keynote speaker dalam kegiatan "Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi ASN", 29 Januari 2024	Sestama
3.	BNPP	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Wilayah 1	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Wilayah 2	
		Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan Sambas	
4.	BKKBN	Diklat PIP Bagi Pendongeng, Youtuber, dan Influencer, diklat PIP dengan Genre BKKBN	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Pesan dan nasehat sebagai kemuliaan leluhur dalam penguatan pranata keluarga di karawang	Deputi HALSKJ
		Pesan dan nasehat sebagai kemuliaan leluhur dalam penguatan pranata keluarga di Semarang	
		Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pendongeng, Youtuber, dan Influencer diklat PIP dengan Genre BKKBN	
		Webinar Sosialisasi Pancasila di lingkungan BKKBN	
		Pesan dan nasehat sebagai kemuliaan leluhur dalam penguatan pranata keluarga	
		Generasi pembudayaan nilai Pancasila, penanaman nilai sebagai pola dan pembentukan strategi keluarga Pancasila	
		Program Percepatan Penurunan Stunting Kick off meeting Pancasila dalam tindakan gerakan semesta mencegah stunting	
5.	BNPT	Diskusi Belanja masalah Penyusunan Alat Ukur di lingkungan Pendidikan	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Rapat Lanjutan antar K/L dalam rangka pengendalian PIP	

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Rapat Terbatas pimpinan tingkat tinggi Kementerian Lembaga	
		Koordinasi pelaksanaan pengendalian PIP di Sumut	
		Munas Komunitas Pemantapan PIP melalui giat Purna Paskibraka Indonesia	
		Pengendalian PIP melalui Diskusi Kiat-Kiat Positif mengisi ruang publik dengan konten positif	
		Peluncuran Film Karakter Animasi, Pancamain Indonesia dan Film Pendek	
		Kegiatan Pembekalan Deteksi Dini Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme Di Indonesia	
		DKT Pengendalian Intoleransi di kalangan pelajar dengan tema "Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pencegahan dan penanggulangan intoleransi dan ekstrimisme"	
		Bimtek Kepamongan dan Penyelenggara Pusdiklat, Pelaksanaan Pengibaran, dan sampai Purnapaskibraka	
		Pelaksanaan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila kepada Pemuda sebagai benteng Radikalisme dan Terorisme	Deputi HALSKJ
6.	Lemhannas	Diskusi Belanja masalah penyusunan alat ukur PIP di lingkungan Pendidikan	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Ibu Rima sebagai Narsum PPRA Lemhanas RI	
		Rapat Lanjutan antar K/L dalam rangka pengendalian PIP (High Level Meeting)	
		Rapat Terbatas pimpinan tingkat tinggi Kementerian Lembaga	
		Penyusunan alat ukur pengendalian dan evaluasi PIP Segmen ASN	
		Koordinasi dengan pusat kajian Pancasila NTT	
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	
		Munas BUMN Pemantapan PIP dengan BUMN	
		Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi alat ukur PIP	
		Koordinasi dengan pusat kajian Pancasila	
		Bimtek Kepamongan dan Penyelenggara Pusdiklat, Pelaksanaan Pengibaran, dan sampai Purnapaskibraka	
		Peluncuran 58 Judul Buku di Ruang Dwi Warna Purwa bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional	
		Kuliah Umum untuk 1.000 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024	

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
7.	Kementerian Agama	DKT Pembahasan Materi Relasi Lintas Iman dalam Bingkai Pancasila dalam rangka penguatan Kebijakan Moderasi Beragama dan Peningkatan Kompetensi Penceramah Agama di Indonesia	Deputi Pengkajian dan Materi
		Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Pembudayaan Pancasila Bersama Komunitas Agama, Komunitas Lingkungan, Komunitas Adat, dan Komunitas Seni	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi di Bidang Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan "Strategi Pembumih Nilai-nilai Pancasila dalam rangka Pencegahan Paham Intoleransi dan Radikalisme di Masyarakat sebagai Langkah Pengendalian PIP"	
		Kajian dan Sosialisasi BTU Pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan Kemenag	Deputi HALSKJ
8.	Kemendes	Webinar Pertemuan Nasional Kepala Desa "Membangun Ekonomi dan Demokrasi dari Desa	Deputi HALSKJ
		Pertemuan Nasional Kepala Desa "Membangun Ekonomi dan Demokrasi dari Desa"	
		"Ngobrol Pancasila di Desa" Desa Pancasila dan Pasar Gotong Royong di Desa Karungan dan Pasar Bahulak Kabupaten Sragen Jawa Tengah	
9.	KPU	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan KPU;	Deputi Hukum dan Advokasi
		Kajian dan analisis terhadap persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak di seluruh Provinsi, Kabupaten/kota;	
		Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan "Demokrasi Pemilu dan Partisipasi	Wakil Kepala BPIP
		Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan "Demokrasi Pemilu dan Partisipasi"	Deputi HALSKJ
		Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
10.	KPK, BNN, BNPT	webinar kolaborasi antara BNPT, BNN, KPK dan BPIP bekerjasama dengan Univ Singaperbangsa Karawang	Deputi Pengkajian dan Materi
11.	ANRI	Akseptasi Dokumen Sejarah Republik Indonesia Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Revisi Risalah Sidang BPUPK	Deputi Pengkajian dan Materi
		Melaksanakan Penelusuran Arsip Naskah Otentik Risalah Sidang BPUPK	Deputi Pengkajian dan Materi
12.	MPR	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Antisipasi Ancaman Radikalisme	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
13.	DPR	Melakukan sosialisasi kepada kaum Milenial	Deputi HALSKJ
		Melakukan penguatan kepada anggota Dewan di tingkat Provinsi/Kota	
		Penelaahan terhadap produk hukum yang akan diundangkan	
14.	Kominfo	Workshop Simulasi Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi (SMI) Pendidikan dan Pelatihan PIP	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Pembuatan perpustakaan Pancasila di lapas lapas di berbagai Provinsi.	
		Rakor Pemulihan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik	SETTAMA
15.	Kemen-dikbudristek	Optimalisasi Penguatan Pancasila dalam RUU Sisdiknas dan Implemenrasi Buku Pancasila dan Forum Group Diskusi dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila Lingkup Pendidikan Formal	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Pengembang Kurikulum Ahli Madya pada kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	
		Diskusi Kelompok Terpumpun Reviu Finalisasi Draf Capaian Pembelajaran dan alur	Deputi Pengkajian dan Materi
		Pelaksanaan DKT Penelaahan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila bagi PAUD sampai Sekolah Menengah Atas	
		DKT pembahasan hasil penelaahan paripurna pertama Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP) melalui Rapat Kerja Penelaahan Tahap II (Finalisasi) Buku Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA	
16.	Kemendagri dan BNPP	Melakukan kegiatan bersama dalam bentuk FGD terkait penyebarluasan Peraturan Kementerian dalam Negeri maupun BNPP dengan melibatkan semua unsur SKPD di daera	Deputi HALSKJ
17.	TNI	Pelaksanaan peluncuran "Program cukup 2 telur" bersama BKKBN dan TNI	Deputi HALSKJ
		Kegiatan mengusung tema "Bersama Merawat Kebangsaan" kepada media digital yang turut merawat kebangsaan melalui 10 isu strategis	
		Pelaksanaan Seminar Kebangsaan "Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa"	
18.	BKKBN dan TNI	Pelaksanaan peluncuran "Program cukup 2 telur"	Deputi HALSKJ
19.	BKKBN dan BNPT	Deklarasi "Remaja Gotong Royong" berasal dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia,	Deputi HALSKJ

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Duta Genre dan Duta Damai Pencegahan Terorisme	
20.	Kemenko Polhukam dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dialog Kebangsaan “Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa”	Deputi HALSKJ
21.	BRIN	Penyusunan Dokumen Ekonomi Pancasila	Deputi HALSKJ
22.	BPS	Ekspose Laporan Pengukuran Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (IAP) Tahun 2021	Deputi HALSKJ
		Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
23.	Lembaga Administrasi Negara	Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Program Eksekutif Nasional (PEN)	Deputi HALSKJ
		Program Eksekutif Nasional (PEN) Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema 'Pengembangan Nasionalisme Ekonomi Berbasis Pancasila'	
24.	Radio Republik Indonesia	Talk Show Kebangsaan	Deputi HALSKJ
25.	KPK	Kampanye anti politik uang	Deputi HALSKJ
26.	Kemenkumham dan Pemerintah daerah Bali	Kegiatan penyusunan produk Hukum Daerah bersama Pemda Bali dan Kanwil Kemenkumham	SETTAMA
27.	Kota Palu	Kegiatan diskusi kelompok terpumpun ke Provinsi hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila di kota Palu provinsi Sulawesi Tengah	Deputi HALSKJ
28.	Pemerintah Provinsi Aceh	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengajar Diklat PIP bagi Guru Dayah, Pengurus FKUB, serta Widyaiswara.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih	Deputi HALSKJ
29.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Melaksanakan pendidikan dan latihan PIP kepada Tokoh Masyarakat	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Monitoring Materi PIP melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang SD, SMP, SMA di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat	Deputi Pengkajian dan Materi
		Pelaksanaan DKT Finalisasi Draf Buku Hermeneutika Karya-karya Sukarno di Ende-Menggali Falsafah Pancasila melalui surat-surat dan Tonil	
30.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pembukaan Perpustakaan yang bernuansakan Pancasila	Deputi HALSKJ
31.	Pemerintah Kota Kupang	Pendidikan dan pelatihan kepada ASN di Kota Kupang	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
32.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah di Wilayah Tengah	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		DKT Perencanaan Pelaksanaan DIKLAT PIP	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
33.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Kegiatan institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah di Wilayah Barat	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
34.	Pemerintah Kota Yogyakarta	Diskusi kelompok terpumpun penyusunan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Pendalaman Muatan Materi Draf Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila Bidang Hukum, Advokasi Pengawasan Regulasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	
35.	Pemerintah Provinsi Bali	Institusionalisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelarasan Pembentukan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Kajian Materi Pancasila bagi PT dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Deputi Pengkajian dan Materi
36.	DPRD Kabupaten Magelang	Konsultasi DPRD Kabupaten Magelang Bersama BPIP terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
37.	Pemerintah Provinsi Jambi	Konsultasi DPRD Provinsi Jambi Bersama BPIP terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
38.	Pemerintah Kota Medan	Internalisasi Indikator Nilai Pancasila Terhadap Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Deputi HALSKJ
39.	Pemerintah Kota Solo	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah dan Finalisasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang, Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi Solo	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
40.	Pemerintah Provinsi Maluku	Internalisasi Indikator Nilai Pancasila Terhadap Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023	Deputi Hukum, Advokasi, dan

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
			Pengawasan Regulasi
41.	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Universitas Merdeka Malang dan DPRD Kab Banyuwangi	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
42.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
43.	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Internalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
44.	Di Provinsi Papua Barat	Koordinasi Kajian Implementasi PIP Di Provinsi Papua Barat	Deputi Pengkajian dan Materi
45.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Penyusunan Strategi Pengendalian PIP dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Perilaku Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Generasi Muda	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila	Deputi HALSKJ
46.	Pemerintah Kota Balikpapan	Evaluasi PIP melalui Seminar Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan ASN Kota Balikpapan	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
47.	DPRD Provinsi Lampung	Pendidikan dan Pelatihan kepada anggota DPRD Provinsi Lampung	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Bimtek Penguatan PIP bagi DPRD Lampung	
48.	Pemerintah Kabupaten Toba	Toba Kaldera Festival Pancamain dan FGD Metode Pengendalian PIP,	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
49.	Pemerintah Kota Bontang	Pembinaan Ideologi Pancasila bagi ASN Kota Bontang	Deputi HALSKJ
50.	Pemerintah Kota Bitung	Jaringan generasi milenial dan generasi Z Pancasila dan simposium nasional	Deputi Pengkajian dan Materi
51.	Pemerintah Kota Lebak	kegiatan Kemah Budaya Mahasiswa Lebak, Penguatan ASN Kab. Lebak, pertemuan perwakilan suku adat Kabupaten Lebak di Bayah	Deputi HALSKJ
52.	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Gotong Royong membangun Ekonomi Pansila melalui Festival Kuliner dan Budaya	Deputi HALSKJ
53.	Pemerintah Kabupaten Pati	Pelaksanaan Peresmian Taman Pancasila dan Tugu Pancasila di Pati	Deputi HALSKJ
54.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Pelaksanaan Seminar PIP dengan tema "Pancasila sebagai dasar Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa dan bernegara di Kabupaten Aceh	Deputi HALSKJ

No.	K/L	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
55.	Pemerintah Sulawesi Utara	Kunjungan Apresiasi Indeks Aktualisasi Pancasila	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
56.	Pemerintah Kota Cirebon	"Ngobrol, Ngabuburit, Ngonten" <i>content creator</i> se-Jabar	SETTAMA
57.	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kirab Panji Mahkota Kemaharajaan Sunda sebagai Mutiara Pancasila	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
58.	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Internalisasi dan Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Per-UU melalui BIMTEK Penyelarasan Indikator Pancasila	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
59.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	<i>Workshop For Your Pancasila</i> se-Jatim	SETTAMA
		DKT Jejaring Pendidik Pancasila dalam rangka sosialisasi Buku Teks Utama	Deputi HALSKJ
60.	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Peresmian Desa Pancasila dan Intervensi <i>Stunting</i>	Deputi HALSKJ
61.	Pemerintah Kabupaten Grobogan	Sosialisasi Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila "Peduli Stunting Sebagai Wujud Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045"	Deputi HALSKJ
62.	Pemerintah Kabupaten Klaten	Pembahasan Penyelarasan RAPERDA bersama Bagian Hukum Setda Klaten	Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
		Kolaborasi BPIP bersama Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penguatan nilai-nilai Pancasila bagi ASN dan masyarakat	Deputi HALSKJ

Tabel 3. 8 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Orsospol dan komponen masyarakat lainnya

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
63.	UNDIP	Penyusunan buku "Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila"	Deputi Pengkajian dan Materi
		Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	
		Pengendalian PIP dalam Pesta Demokrasi Tahun 2024	
		Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Deputi HALSKJ

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Strategi Penerapan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Jenjang Pendidikan Tinggi	
		Pembumih Pancasila di Dies Natalis Fakultas Hukum	
64.	TVRI	Program Indonesia Bicara	Deputi HALSKJ
		Program Indonesia Damai	
		Dialog dan Siaran Langsung Hari Lahir Pancasila	
		Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Ende	
65.	UGM, UIN SUNAN KALIJAGA DAN INFID	Penyusunan buku "Ketuhanan dalam bingkai Pancasila Perspektif Lintas Iman"	Deputi Pengkajian dan Materi
		Penyusunan Buku "SIGMA PANCASILA: Mengenyam Kepelbagaian, Meneguhkan Keindonesiaan"	
		Pelaksanaan Simposium Nasional Studi Ekonomi Berparadigma Pancasila	
		<i>Call for Paper</i> Simposium Nasional Studi Ekonomi Berparadigma Pancasila	
		Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	
66.	KPOTI	Pemodelan Pengendalian di Kep.Seribu melalui Permainan Tradisional	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Rapat koordinasi pengendalian PIP komunitas pemuda	
		Munas Komunitas pemantapan PIP melalui giat komunitas seluruh Indonesia	
		Munas Pemantapan PIP melalui Giat Permainan Tradisional Indonesia	
		Pancasila Dalam Tindakan "Belajar Pancasila Melalui Dongeng dan Permainan Tradisional"	
		Dialog "Tetap Sehat, Bahagia dan Berbudaya di Rumah Melalui Permainan Tradisional"	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Webinar menanamkan nilai moral dan karakter anak melalui dongeng dan permainan tradisional DKT Pengendalian PIP Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi di bidang Pembudayaan bersama Ormas Webinar Umkm Dan Pedagang Online Sebagai Benteng Ekonomi Pancasila Di Masa Pandemi Covid-19 Perkenalan Pancamain Indonesia Webinar Strategi Mempopulerkan Permainan Tradisional Finalisasi Pancamain Indonesia Refleksi Hari Sumpah Pemuda Peran Pemuda dalam menjaga Persatuan Indonesia pada kondisi pandemi sebagai wujud Pancasila dalam Tindakan Gotong Royong Peluncuran Film Karakter Animasi, Pancamain Indonesia dan Film Pendek Belajar Pancasila melalui Pancamain Indonesia Ekonomi Pancasila Berbasis Komunitas di Era Digitalisasi Diskusi "Model Ekonomi Berbasiskan Kearifan Lokal" Launching Pancamain Indonesia Koordinasi dengan Kab Gianyar dalam pengembangan produk Pancamain Indonesia Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian PIP melalui Sosialisasi Pancamain Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan Pembinaan KPOTI Pengembangan Produk Pancamain Indonesia Sebagai Alat Pengendalian PIP Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Pembudayaan Pancasila	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Bersama Komunitas Agama, Komunitas Lingkungan, Komunitas Adat, dan Komunitas Seni	
		Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Pembudayaan Pancasila Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
		Peninjauan Kampung Pancasila	
		Webinar Pengenalan Pancamain Indonesia Kepada Tenaga Pendidik	
		KOTI menjadi peserta dalam kegiatan Diskusi Grup Terpumpun pembahasan Diklat PIP Bagi Komponen Masyarakat Lainnya	Direalisasikan oleh Deputi Pendidikan dan Pelatihan
67.	PPI	Rapat koordinasi pengendalian PIP komunitas pemuda	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Pancasila Dalam Tindakan Melalui Diskusi Bersama PPI Dalam Memperingati Hari Kartini	
		Webinar Umkm Dan Pedagang Online Sebagai Benteng Ekonomi Pancasila Di Masa Pandemi Covid-19	
		Pembekalan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Paskibraka Tahun 2020	
		Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan Sambas	
		PIP Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	
		Rapat koordinasi pengendalian PIP komunitas pemuda II	
		Diskusi Belanja masalah Penyusunan Alat Ukur PIP di lingkungan Pemuda	
		Munas Komuitas Pemantapan PIP melalui giat Purna Paskibraka Indonesia	
		Upacara peringatan sumpah pemuda bersama PPI	
		<i>Presidential Lecturer</i> dengan mahasiswa sejabodetabek	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Koordinasi dengan pusat kajian Pancasila Kalimantan Barat	
		Koordinasi dengan pusat kajian Pancasila Sulawesi Barat	
		Pancasila dalam tindakan Webinar peringatan hari Kartini "Kartini Muda" produktif berkarya ditengah Pandemi	
		Pengendalian PIP melalui Diskusi Kiat-Kiat Positif mengisi ruang publik dengan konten positif	
		DKT Pengendalian PIP Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi di bidang Pembudayaan bersama Ormas	
		Rapat Pembahasan PIP Generasi Muda melalui Program Paskibraka	
		Refleksi Hari Sumpah Pemuda Peran Pemuda dalam menjaga Persatuan Indonesia pada kondisi pandemi sebagai wujud Pancasila dalam Tindakan Gotong Royong	
		Peluncuran Film Karakter Animasi, Pancamain Indonesia dan Film Pendek	
		Rapat Pembahasan rekrutmen calon Paskibraka	
		Workshop <i>Digital Culture</i> dengan tema "Peran Aktif Purna Paskibraka Indonesia dalam rangka Membangun Karakter Bangsa di Era Digital"	
		Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Pemuda Pemudi Panutan Pancasila	
		Rapat Persiapan Pelaksanaan PIP Kepada Generasi Muda Melalui Program Paskibraka	
		Kelas PIP pada Pelatihan Public Speaking bersama Siberkreasi dan KOMINFO	
68.	Universitas Udayana	Diskusi Belanja masalah Penyusunan Alat Ukur di lingkungan Pendidikan	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Pengendalian PIP dan Pembahasan Penyusunan Alat ukur di Bali	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Kelompok Terpumpun Aktualisasi Pancasila dalam dunia pendidikan	
		Penyusunan alat ukur pengendalian dan evaluasi segmen Pendidikan	
		Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi alat ukur PIP	
69.	Universitas Indonesia	Penyusunan alat ukur pengendalian dan evaluasi	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi alat ukur PIP	
		Terealisasi Dosen dari Universitas Indonesia menjadi peserta dan narasumber dalam kegiatan Diskusi Grup Terpumpun Komponen Masyarakat Lainnya	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	
70.	Universitas Gadjah Mada	Koordinasi Pengendalian PIP dengan Pusat Kajian Pancasila Yogyakarta	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Penyusunan alat ukur pengendalian dan evaluasi di lingkungan Pemuda	
		Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi alat ukur PIP	
		Koordinasi Pengendalian PIP dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM	Deputi HALSKJ
		Monitoring Program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Penggerak Pancasila	
		Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia", beKerja Sama dengan PSP UGM	
		Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
71.	Universitas Negeri Semarang	Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Demokrasi Pancasila	
		Pembekalan materi PIP kepada 2.851 mahasiswa Universitas Negeri Semarang	
72.	Universitas Negeri Makassar	Koordinasi Pengendalian PIP dalam rangka meminimalisir sikap intoleransi dan radikalisme	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
73.	Universitas Negeri Jakarta	Webinar belajar Pancasila melalui Pancamain Indonesia	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
		Webinar belajar Pancasila melalui Pancamain Indonesia dan Diskusi Kelompok Terpumpun/ Fgd "Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila"	
		Diskusi Kelompok Terpumpun/ Fgd "Standarisasi Pendidikan Dan Pelatihan PIP	
		Penyelarasan Buku Saku Pengkajian Implementasi Pancasila dan Pengolahan Buku Saku	Deputi Pengkajian dan Materi
		Seminar Nasional "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia"	Deputi HALSKJ
74.	Universitas Pertahanan	Diskusi Kelompok Terpumpun Peningkatan Kemitraan BPIP dengan Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya melalui <i>Clearing House</i> Rumah Gotong Royong	Deputi HALSKJ
75.	Universitas Negeri Medan	Kegiatan Webinar Vol. 1 "Sinergi Mewujudkan Tenaga Pendidik Berkarakter Pancasila"	Deputi HALSKJ
76.	Universitas Negeri Padang	"Koordinasi Standardisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Berbasis Kearifan Lokal (Wilayah Barat)"	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Penyusunan Standarisasi Materi dan Bahan Ajar PIP Bagi Kepala Daerah	
		"Koordinasi Standardisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Berbasis Kearifan Lokal (Wilayah Barat)" di Padang, Sumatera Barat; Penyusunan	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Standarisasi Materi dan Bahan Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Kepala Daerah	
		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	
		Kompetisi Pidato dan Karya Tulis Ilmiah yang melibatkan Tim BPIP sebagai Dewan Juri	
77.	Universitas Pendidikan Indonesia	Penyusunan Standar Proses Pembelajaran Pancasila di Pendidikan Formal	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Penyusunan Kurikulum Pemusatan Program Paskibraka	
		Penyusunan Standar Bahan Ajar dan Metode di Lingkungan Nonformal	
		Penguatan Ideologi Pancasila bagi calon Guru Sekolah Dasar (SD) UPI	
		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	
		Undangan Kepakaran Narasumber Guru Besar UPI pada kegiatan Rapat Koordinasi Standarisasi Kurikulum Diklat PIP	
		Penyusunan Standar Bahan Ajar dan Metode PIP Di Lingkungan Nonformal	Deputi Pengkajian dan Materi
		Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia"	Deputi HALSKJ
78.	Universitas Negeri Yogyakarta	Koordinasi awal BPIP Dengan PSP UGM dan PSPK UNY dalam rangka penyelenggaraan Diklat PIP	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
79.	Universitas Negeri Surabaya	Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Demokrasi Pancasila	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
80.	IAIN Curup	Kuliah Umum Bagi Civitas Akademika IAIN Curup	Deputi HALSKJ
81.	UIN Walisongo Semarang	Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
82.	ADKASI	Diskusi Kelompok Terpumpun Monitoring Evaluasi Kerjasama antara BPIP dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) & BPIP dengan Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua	Deputi HALSKJ
		PKS antara Deputi Pengkajian dan Materi dengan ADKASI pada september	Deputi Pengkajian dan Materi
		Diklat Nasional Pemantapan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten Seluruh	
		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
		Rapat koordinasi dan diklat di Jakarta (Diklat Nasional Pemantapan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia	
83.	UNI PAPUA	Kegiatan Persamuan Nasional Pembakti Desa, Komunitas dan Jejaring di Anyer sebagai peserta pada kegiatan Persamuan Nasional Pendidik Pancasila : Narasi, Rasa, dan Laku Lampa	Deputi HALSKJ
		FGD pembahasan tindak lanjut kerjasama dengan PT. Balai Pustaka, Purnapakibraka (PPI), Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional (KPOTI) dan Perkumpulan Sepakbola Uni Papua	
		Pemberian apresiasi prestasi ikon Pancasila	Deputi Advokasi, Hukum dan Pengawasan Regulasi
84.	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	Diskusi Kelompok Terpumpun aktualisasi Pancasila pada organisasi masyarakat	Deputi HALSKJ
		Diskusi Ekonomi Pancasila dengan Dekan Fakultas Ekonomi	
		Simposium Nasional Kebijakan Pancasila sebagai <i>Weltanschauung</i> bersinergi	

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		dengan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	
85.	Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia (Pertinasia)	Deklarasi Pencanangan Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional TTD MoU dan Talkshow Hasil Survei Nasional tentang Orientasi Publik terhadap Pancasila dan Isu-Isu Kebangsaan	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
86.	Cipayung Plus	Seminar Dalam Rangka Menyambut Hari Pahlawan, Dengan Tema, Pemuda Bicara “Menyongsong Indonesia 2045”	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
87.	PT Dakwah Inti Media (TV 9)	Perjanjian Kerjasama PT Dakwah Inti Media (TV 9)	Deputi HALSKJ
88.	RRI	Spesial Talkshow Pembinaan Ideologi Pancasila mewujudkan Generasi Muda Tanggung Indonesia Emas Dialog Interaktif: Deklarasi dan Rencana Aktualisasi Pancasila	Deputi HALSKJ
89.	Jawa Pos Media Televisi (JTV)	Perjanjian Kerjasama Jawa Pos Media Televisi (JTV)	Deputi HALSKJ
90.	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
91.	RSUD Dr.Moewardi	Deklarasi RSUD Dr. Moewardi sebagai Benteng Pancasila dan Workshop Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Cinta Tanah Air	Dep Adv, Hukum dan Pengawasan Regulasi
92.	Universitas Jember	Semarak Bulan Pancasila di Universitas Jember	Deputi HALSKJ
93.	Univesitas Nahdlatul Ulama	Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Kuliah Umum Kebangsaan	Deputi HALSKJ
94.	Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Sosialisasi Pancasila dan Dialog Kebangsaan Implementasi UU Sisnas IPTEK: Penguatan Perguruan Tinggi Nasional Menuju Indonesia Emas Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku “Pancasila dari Indonesia Untuk Dunia”	Deputi HALSKJ

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
95.	IPDN	Evaluasi PIP melalui Seminar Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan ASN Alumni IPDN dan Calon ASN Mahasiswa IPDN	Deputi Pengendalian dan Evaluasi
96.	UMKMI	Bingkai Pancasila	Dep Adv, Hukum dan Pengawasan Regulasi
97.	IAIN Ternate	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku	Deputi HALSKJ
98.	UIN Sunan Ampel	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika UINSA	Deputi HALSKJ
99.	Universitas Khairun	Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Kearifan Lokal	Deputi HALSKJ
100.	KOMPAS	Seminar Pancasila Series	Deputi HALSKJ
101.	Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)	Penandatanganan kemitraan antara BPIP dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)	Deputi HALSKJ
102.	UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Pembinaan kolaborasi dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan mengusung tema; "Islam, Pancasila dan Kebangsaan"	Deputi HALSKJ
103.	IAIN Palangkaraya	Penyusunan Dokumen Ekonomi Pancasila	Deputi HALSKJ
104.	Balai Pustaka	Diskusi Kelompok Terpumpun penyusunan Materi bersama Balai Pustaka	Deputi HALSKJ
105.	Pusat Studi Pancasila UGM	Penyelarasan Buku Saku Pengkajian Implementasi Pancasila dan Pengolahan Buku Saku Strategi Penerapan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Jenjang Pendidikan Tinggi	Deputi Pengkajian dan Materi
106.	UIN Sunan Kalijaga	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Jurnal ilmiah Pancasila: Jurnal Keindonesian (PJK) Volume 3 Diskusi Kelompok Terpumpun Perencanaan Jurnal Ilmiah Gotong Royong (GR)	Deputi Pengkajian dan Materi

No	Instansi/ Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Perampungan Buku Saku Pengkajian PIP dan Tindak Lanjut Strategi Implementasi Buku Pendidikan Pancasila	Deputi HALSKJ
		Sosialisasi Pancasila bagi Gen Z	
		Sarasehan Pancasila	
107.	Universitas Negeri Malang	Sosialisasi Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan	Deputi HALSKJ
108.	IAIN Langsa	Pelaksanaan Seminar Pancasila dalam perspektif lokal dan global	Deputi HALSKJ
109.	UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki)	Stadium General “Moderasi Beragama dan Penguatan Nilai-nilai Pancasila”	Deputi HALSKJ
110.	PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia)	Seminar Nasional PIP dalam rangka Hari Nyepi	Deputi HALSKJ
111.	Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	Ngabuburit Kebangsaan	Deputi HALSKJ
112.	Universitas Mahendratna Bali	Kajian Materi Pancasila dalam rangka MBKM	Deputi Pengkajian dan Materi
113.	Universitas Riau	Olimpiade PPKN Tingkat Nasional	Deputi HALSKJ
114.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Seminar Nasional “Pancasila dari Indonesia untuk Dunia	Deputi HALSKJ
115.	Persatuan Guru Republik Indonesia	Penyusunan Standar Proses Diklat bagi Persatuan Guru Republik Indonesia	Deputi Pendidikan dan Pelatihan
116.	Komisi Penyiaran Indonesia	Kolaborasi BPPI dan KPID Jawa Barat: Sinergi untuk membumikan Pancasila	Deputi HALSKJ
117.	IAIN Zawiyah Cot Kala	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Deputi HALSKJ
118.	Politeknik Negeri Kupang	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Seminar Pancasila untuk Dunia “ <i>To Build The World a New</i> ”	Deputi HALSKJ
119.	Universitas Muhammadiyah Kupang	Kolaborasi DKT Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara	Deputi HALSKJ
120.	Universitas Patimura	Kolaborasi DKT Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara	Deputi HALSKJ

Capaian Insitusionalisasi kepada K/L/D pada Tahun **2024** bertambah sejumlah 25 K/L/D **dibandingkan** dengan Tahun **2023** terjadi penambahan 23 K/L/D/Ormas, terjadi penurunan capaian institusionaliasi kepada K/L/D/Ormas. Hal ini disebabkan oleh pergeseran fokus pada penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pada Komponen Masyarakat lainnya (Kelompok Masyarakat).

Keberhasilan upaya institusionalisasi yang dilakukan BPIP didukung upaya-upaya, antara lain: hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, jaringan, pembudayaan, hukum, pengawasan regulasi, advokasi, dan rekomendasi.

b.1. Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama, Sosialisasi, dan Jaringan Pembudayaan

Ruang Lingkup Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan kerja sama dalam pengarusutamaan PIP yang ditindaklanjuti dengan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* perlu dilakukan karena masih kurangnya pemahaman Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya Pancasila dan belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila, sehingga apa yang diharapkan oleh negara terhadap BPIP untuk menjadi lembaga koordinator PIP dapat segera terwujud.

Selain dari Kinerja HAL dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 terdapat 16 Kerjasama baik Nota Kesepahaman, MoU, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani bersama antara BPIP dengan mitra kerjanya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 MoU & Perjanjian Kerjasama Pengarusutamaan Ideologi Pancasila

No	Kementerian/Lembaga/Orsospol	Bentuk Kerjasama (MoU/PKS)	PN/Non PN
1	Yayasan Anak Bangsa Indonesia	Perjanjian Kerja Sama	Non PN
2	Kabupaten Kuningan	Nota Kesepakatan	PN

No	Kementerian/Lembaga/Orsospol	Bentuk Kerjasama (MoU/PKS)	PN/Non PN
3	Kabupaten Pati	Nota Kesepakatan	PN
4	IAIN Langsa	Perjanjian Kerja Sama	PN
5	UIN Maulana Malik Ibrahim	Perjanjian Kerja Sama	PN
6	UIN Alauddin Makassar	Perjanjian Kerja Sama	PN
7	IAIN Palopo	Perjanjian Kerja Sama	PN
8	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Perjanjian Kerja Sama	PN
9	LEMHANNAS (Dep TAPLAI LEMHANNAS - Dep DIKLAT BPIP)	Perjanjian Kerja Sama	PN
10	Sekretariat DPRD Sumatera Utara	Perjanjian Kerja Sama	PN
11	Universitas Pendidikan Indonesia	Perjanjian Kerja Sama	PN
12	Universitas Pendidikan Indonesia Cibiru	Perjanjian Kerja Sama	PN
13	BKPSDM Pemerintah Provinsi Bali	Perjanjian Kerja Sama	PN
14	Universitas Diponegoro	Perjanjian Kerja Sama	PN
15	Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat	Perjanjian Kerja Sama	PN
16	Sekretariat DPRD Lampung	Perjanjian Kerja Sama	PN

Kerjasama tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti, dan dimonitor implementasinya sebagai upaya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila.

BPIP dalam metode dan/atau media sosialisasi, komunikasi, dan jaringan dilakukan melalui, yaitu: penyusunan materi sosialisasi di media sosial, pelaksanaan sosialisasi, penyusunan materi komunikasi pada media masa, pelaksanaan komunikasi pada media online dan media radio, membina jaringan komunitas yang memberitakan konten-konten bernuasa nilai-nilai Pancasila. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan Media sebagai sarana utama, baik media massa *offline*, media *online*, media TV, media radio, dan media sosial; mengembangkan komunikasi dengan media pemberitaan dari platform *steraming online* seperti *youtube* dan media seperti TVRI, Kompas TV, RRI, Elshinta Radio, dan lain-lain; mengembangkan jaringan dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan organisasi masyarakat, dan jurnalis.

Pengukuran keberhasilan adalah melihat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik terhadap konten

atau pemberitaan yang dibuat oleh BPIP dalam melaksanakan PIP. Berikut adalah tabel Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik:

Tabel 3. 10 Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

NO	Judul	Tahun	Qty	Viewers
1	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila melalui Bedah Buku “Pancasila dari Indonesia untuk Dunia”	2024	1	190
2	Seminar Nasional dan Bedah Buku: “Pancasila dari Indonesia untuk Dunia” di Kampus UGM Yogyakarta	2024	1	194
3	Bedah Buku: Pancasila dari Indonesia untuk Dunia	2024	1	143
4	Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur	2024	1	126
5	Produksi Materi Penyiaran Strategi Komunikasi Refleksi Akhir Tahun 2024	2024	1	118.293
6	Peliputan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, dalam Berbangsa dan Bernegara, Kedaulatan Sumber Daya Alam di Pontianak, Kalimantan Barat	2024	1	650.149
7	Peliputan Musyawarah Gotong Royong Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur Pengadaan yang Dikecualikan Untuk Industri Kreatif dalam Kegiatan Peliputan Musyawarah Gotong Royong Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Medan	2024	1	498.129
8	Kegiatan Peliputan Musyawarah Gotong Royong Forum Group Discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Medan	2024	1	289.677
9	Penguatan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Podcast Salam Pancasila di Radio	2024	200	1.799.916
10	Penguatan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Podcast “SAMPAN” di Youtube	2024	18	5225
Jumlah			226	3.362.042

Untuk mewujudkan BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan PIP dalam penyelenggaraan negara di tingkat K/L/Pemda, salah satu

langkah strategis yang dilakukan adalah pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan ini menjadi indikator utama keberhasilan PIP, mengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berpegang teguh pada falsafahnya sendiri, yakni Pancasila.

Sejarah mencatat bahwa dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945, Bung Karno telah mengemukakan dasar filosofis negara sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan yang dijalankan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, konstitusi negara, yaitu UUD 1945, telah merangkum konsepsi ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh. Untuk itu, pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus berlandaskan pada pertimbangan filosofis, historis, antropologis, yuridis, dan sosiologis, guna memastikan bahwa rakyat Indonesia benar-benar menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan lima sila Pancasila.

Agar pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat diyakini, dipahami, dan diaktualisasikan secara nyata, upaya ini perlu dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu desa/kelurahan. Desa menjadi titik awal dalam proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila menuju desa berdikari, di mana semangat gotong royong dihidupkan dan nilai-nilai Pancasila diarusutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tahapan ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terinternalisasi secara mendalam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang mandarah daging (*habituasi*) sejak dini dan dalam cakupan yang lebih luas.

Pembudayaan nilai Pancasila yang sudah dirintis saat ini sudah dilakukan melalui pendampingan desa berdikari, silaturahmi dengan komunitas adat, membuat *event-event* pembudayaan melalui komunitas masyarakat. Adapun kelompok masyarakat yang telah dilakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila Tahun 2024, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 11 Kelompok Masyarakat yang telah dilakukan pembudayaan

NO	Nama Pokmas/Komunitas
1.	Yayasan Darma Bakti Karya
2.	Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum
3.	PCNU Surabaya
4.	Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Muhammadiyah Gersikan Tambaksari
5.	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
6.	Badan Kerja Sama Antar Gereja Kabupaten Pati
7.	Yayasan Subur Makmur Sejahtera
8.	Gabungan Organisasi Wanita Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (GOW PKK) Kabupaten Pati
9.	Yayasan Al Khidmah Kabupaten Pati
10.	Permadani (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia)
11.	Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pati
12.	Yayasan Maqam Ki Ageng Penjawi
13.	Rumah Anak Pancasila
14.	Atap Keberagaman
15.	Sanggar Trotoar
16.	Pemuda Garuda Kesaktian
17.	Nusantara Centre
18.	Masyarakat Urban dan Ibukota
19.	Barongan Pati
20.	Komunitas Notaris Indonesia Berkebaya
21.	Komunitas Perempuan Berkebaya
22.	Galang Kemajuan Satu Warna (GKSW)
23.	Komunitas Kebaya, Kopi & Buku
24.	Komunitas Kain Kebaya Indonesia (KKI)
25.	Alumni SMA Surabaya Bersatu (ASSB)
26.	Ikatan Keluarga Besar TTS Sejabodetabek
27.	Komunitas Perempuan Pelestari Budaya Indonesia
28.	IKB TNS (Ikatan Keluarga Besar Teon Nila Serua)
29.	Komunitas Alumni SMA Jakarta Bersatu
30.	Sanggar Trotoar
31.	Setya Kita Pancasila
32.	Srikandi Nusantara
33.	Taman Baca Masyarakat Garuda
34.	Aliansi Disabilitas Nusantara
35.	Organ Kembang Latar
36.	Masyarakat Urban Ibukota
37.	Ikatan Keluarga Besar Mollo
38.	Sanggar Trotoar
39.	Setya Kita Pancasila
40.	Srikandi Nusantara
41.	Komunitas Seni Teras Pancasila
42.	Gerakan Pendidikan Indonesia Baru
43.	Komunitas Pelestari Budaya Indonesia

NO	Nama Pokmas/Komunitas
44.	Pijar
45.	Badan Musyawarah Masyarakat Bima
46.	Badan Musyawarah Keluarga Jambi
47.	Forum Bhineka Indonesia
48.	Brigade Nasional
49.	Perempuan Pemimpin Indonesia
50.	Pijar Jakarta Timur
51.	Srikandi Budaya Nusantara
52.	Penari Penjaga Negeri
53.	Perempuan Berkebaya Indonesia
54.	Bunda Milenial
55.	Pelestari Kebaya Dan Budaya
56.	Pejuang Wanita Tangguh
57.	Pecinta Sanggul Nusantara
58.	Komunitas Cinta Nusantara
59.	Gemilang Karya Satu Nusantara
60.	Komunitas Menari Tari Nusantara
61.	Komunitas Panduan Suara Gabrela
62.	Wanita Sarinah Berkebaya
63.	Perempuan Nusantara Berkreasi
64.	Srikandi Gebyar Nusantara
65.	Pengawal Pancasila Damai
66.	Mama Cinta Kebaya Dan Batik
67.	CKB (Cinta Kebaya dan Budaya)
68.	NB (Notaris Berkebaya)
69.	Komunitas Sekar Jiwanta
70.	Komunitas Rampah Sarinah Jakarta
71.	Komunitas Pejuang Negeri Tercinta
72.	Komunitas Perempuan Pecinta Budaya Indonesia
73.	Komunitas Kain Dan Kebaya
74.	Komunitas Cinta Budaya Nusantara
75.	Komunitas Cinta Berkebaya
76.	Forum Komunikasi Badan Penghubung Provinsi Seluruh Indonesia (Forkappsi)
77.	Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur
78.	Badan Penghubung Provinsi Maluku
79.	BMMPB (Badan Musyawarah Masyarakat Pemerintah Bengkulu)
80.	Badan Penghubung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
81.	Badan Penghubung Pemprov Kaltara
82.	Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta
83.	WBI (Wanita Bersanggul Indonesia)
84.	Komunitas Kebaya Menari
85.	Komunitas Indonesia Menari
86.	Komunitas Belantara Budaya
87.	JO SMART
88.	KCBI (Komunitas Cinta Berkain Indonesia)

NO	Nama Pokmas/Komunitas
89.	Kebaya Foundation.
90.	Komunitas Perempuan di Perantauan
91.	Komunitas Perempuan Manggarai
92.	Komunitas Seknas Perempuan
93.	Komunitas Kridhadari
94.	Komunitas Laksmi Kinasih
95.	Komunitas Libas
96.	Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten
97.	Komunitas Sinar Pusaka Putra
98.	FPK Provinsi DKI Jakarta
99.	FPK Kota Administrasi Jakarta Pusat
100.	FPK Kota Administrasi Jakarta Timur
101.	FPK Kota Administrasi Jakarta Selatan
102.	FPK Kota Administrasi Jakarta Barat
103.	FPK Kota Administrasi Jakarta Utara
104.	Bundo Kanduang Provinsi DKI Jakarta
105.	Maluku Utara Bersatu
106.	JTS Kamayoran
107.	Ikatan Keluarga Besar Papua
108.	Mpok None Bamus Betawi
109.	Forum Kader Bela Negara Provinsi DKI Jakarta
110.	Ikatan Keluarga Minangkabau
111.	Wanita Forkabi
112.	Seusama Aceh
113.	Beranda UMKM Jakarta Timur
114.	Indonesia Timur Bersatu
115.	Kopemi
116.	AGPPKNI Provinsi Sumatera Utara
117.	AGPPKNI Provinsi Jawa Timur
118.	AGPPKNI Provinsi Sulawesi Selatan
119.	Padepokan Seni Bagonk Grup
120.	Forum Silaturahmi Tokoh Majelis Taklim (Forsitma) DPC Pasar Rebo
121.	Komunitas Perempuan dan Ketahanan Keluarga Jakarta Timur/Partai Keadilan Sejahtera
122.	Jendela Ide
123.	Bumi Dega
124.	Kampung Adat Cirendeu
125.	Organisasi Budi Budaya
126.	Ajaran Mei Kartawinata
127.	Paguyuban Kepala Desa Baturaden
128.	Perkumpulan Gerakan Hidup Pancasila Kab.Banyumas
129.	Assosiasi E-Commerce Indonesia
130.	Satgas Pancasila Palu
131.	Komunitas Tadulako Palu Sulteng
132.	Glantung Go Malang Jatim
133.	Pedati Palu Sulteng

NO	Nama Pokmas/Komunitas
134.	Polelea Sigli Sulawesi Tengah
135.	Sanggar Gonnengah Sulawesi Selatan
136.	Assosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan PPKN
137.	Desa Ciseureuh Brebes Jateng
138.	Kampung Adat Jalawastu Brebes Jateng
139.	Karang Taruna Ciseureuh Brebes
140.	Sapta Darma Yogyakarta
141.	Srikandi Lintas Iman Yogyakarta
142.	Trisuka
143.	Generasi Muda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
144.	Saung Angklung Udjo
145.	Himpunan Keluarga Maluku Utara
146.	Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat
147.	Studio Titik dua Ciamis
148.	Sanggar Rakyat Ciamis
149.	TTMC Teater Tari Ciamis
150.	Komunitas Baca Puisi Ciamis



PENGANUGRAHAN IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2024

b.2. Institusionalisasi Pancasila Di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/ staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Tahun 2024 BPIP telah melaksanakan analisis kajian kebijakan dan regulasi yang menghasilkan 32 (tiga puluh dua) rekomendasi peraturan perundang-undangan. Rekomendasi atas analisis kajian kebijakan dan regulasi ini menghasilkan rekomendasi peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan disampaikan ke Unsur Pimpinan di lingkungan BPIP. Berikut adalah daftar rekomendasi peraturan/regulasi yang dikaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu:

Tabel 3. 12 Daftar Peraturan/Regulasi yang diberikan Rekomendasi

No	Peraturan Perundang-undangan / Kebijakan
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat;
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
3.	Rancangan Gubernur Provinsi Banten tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya bagi Masyarakat Tidak Mampu;
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5.	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Dan Perikanan;
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

No	Peraturan Perundang-undangan / Kebijakan
7.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
12.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik;
14.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu;
15.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila;
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam penanggulangan bencana;
17.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
18.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
19.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta Tahun 2023-2043;
20.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Lokal;
22.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
23.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
24.	UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
25.	Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

No	Peraturan Perundang-undangan / Kebijakan
26.	Peraturan Daerah Kab. Bulukumba No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
27.	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan
28.	Peraturan Bupati Purwakarta No. 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter
29.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan
30.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.
31.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
32.	Peraturan Daerah Kab. Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah

Peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah harus memiliki nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian semua Peraturan Perundang-undangan baik yang merupakan produk Lembaga Legislatif maupun Eksekutif, tidak boleh bertentangan, dan harus berdasar pada Pancasila. Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara. Konsekuensi logis diantunya asas hierarkhi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Tahapan yang harus dilalui dalam lahirnya suatu kebijakan atau produk perundang-undangan, adalah Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan, Pengundangan dan Evaluasi,

di mana nilai-nilai Pancasila sudah mulai diinternalisasi sejak awal sampai pada tahap implementasi.

Rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tidak hanya untuk menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, melainkan juga untuk mewujudkan hukum yang berkualitas, memuat nilai-nilai budaya hidup dalam masyarakat, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan global untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terwujud harapan dan cita-cita bangsa.



FGD SERIES: KERAPUHAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA

c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional

Hakikat PIP merupakan bagian dari peneguhan kembali jalan ideologis, yang tidak terpisahkan dari upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. BPIP sebagai salah satu lembaga yang ditugasi untuk mewujudkan tersebut, berupaya menghasilkan arah kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan massif dalam PIP secara Nasional. Ukuran kinerja terwujudnya arah kebijakan PIP adalah rekomendasi substansi atau rekomendasi kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Tahun 2024 indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 13 IKU Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5	5

Berikut adalah substansi rekomendasi yang disampaikan:

Tabel 3. 14 Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden

Substansi Rekomendasi	Keterangan*
Arah Kebijakan Dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029	Telah disampaikan ke Presiden. (nilai: 100)
Hasil Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Telah disampaikan ke Presiden. (nilai: 100)
Hasil Sertifikasi Pengajar/Penceramah Pembinaan Ideologi Pancasila	Telah disampaikan ke Presiden. (nilai: 100)
Hasil Kajian Kebijakan Dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Pancasila	Telah disampaikan ke Presiden. (nilai: 100)
Tempat Pemusatan Diklat Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Telah disampaikan ke Presiden. (nilai: 100)
Kinerja= $\frac{100+100+100+100+100}{5} \times 100\% = 100\%$	

Perbandingan substansi Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden antara tahun **2024** dengan Tahun **2023** adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Perbandingan Rekomendasi Tahun 2024 dengan 2023

Rekomendasi Tahun 2024	Rekomendasi Tahun 2023
Arah Kebijakan Dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029	Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila bagi Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas
Hasil Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Dokumen Cetak Biru Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Hasil Sertifikasi Pengajar/Penceramah Pembinaan Ideologi Pancasila	Penyusunan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
Hasil Kajian Kebijakan Dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Pancasila	Penyusunan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila
Tempat Pemusatan Diklat Pembentukan Paskibraka Tingkat Pusat Dan Pembinaan Ideologi Pancasila	Penyusunan rekomendasi evaluasi terhadap unsur-unsur yang menentang Ideologi Pancasila

Dalam mewujudkan arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional dilakukan langkah-langkah kegiatan strategis yaitu sebagaimana uraian di bawah ini.

c.1. Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, Dan Standardisasi Materi PIP

Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (*logos*) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Dengan kata lain, Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Hal tersebut dapat dilakukan secara konkret misalnya dengan melaksanakan berbagai kajian-kajian keilmuan terkait dengan arah kebijakan PIP yang mencakup upaya untuk mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila, mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, dan penyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

- 1) Masih belum terinternalisasi dan terinstitusionalisanya nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Ormas/Orsospol, dan Komponen masyarakat lainnya;
- 2) Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
- 3) Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
- 4) Rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis; dan
- 5) Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Langkah-langkah perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025-2029 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi;
- 2) Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
- 3) Implementasi BTU Pendidikan Pancasila pada Satuan Pendidikan dibawah Koordinasi Kementerian Agama RI; dan
- 4) Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila pada kebijakan Pendidikan Nasional (Profil Pelajar Pancasila, P5 dan Zonasi).

Beberapa potret kajian dan materi, adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 12 Dokumen Pengkajian PIP 2024



Gambar 3. 13 NSPK Materi, Bahan Ajar, Implementasi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila



DOA BERSAMA LINTAS AGAMA

c.2. Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi PIP

Beberapa subtansi pengendalian dan evaluasi PIP Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Pengendalian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	KET
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan PIP	Telah disampaikan dan ditindaklanjuti melalui penyampaian kepada Kantor Staff Presiden

Pengendalian Pembinaan Ideologi Eksternal sudah dilakukan untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan Perguruan Tinggi. Untuk K/L yaitu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan KPPPA. Untuk Perguruan Tinggi yaitu; Universitas Diponegoro dan UIN Alauddin Makassar. Untuk pemerintah daerah yaitu; Pemkot Malang, Pemkab Kuningan, Pemkab Pati, Pemkot Jambi, Pemkab Klaten, Pemprov NTT, Pemprov Jawa Timur.

Pengendalian Internal untuk kedeputian di BPIP sudah dilakukan antara lain untuk Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan terdiri dari Pengendalian pada Sosialisasi Buku Teks Utama Berbasis Kampus Negeri dan Penandatanganan MOU, Untuk Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi terdiri dari Pengendalian PIP pada FGD Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara. Untuk Kedeputan Pengkajian dan Materi yaitu; Pengendalian pada sosialisasi BTU Berbasis Agama, Materi Calon Paskibraka, Arah Kebijakan dan Peta Jalan PIP. Untuk Kedeputan Pendidikan dan Pelatihan yaitu; Pengendalian PIP pada Program Paskibraka dan Kurikulum Diklat. Untuk Internal Kedeputan Bidang Pengendalian dan Evaluasi yaitu Pengendalian pada IAP dan IPLP sedang dalam proses pelaksanaan.

Tabel 3. 17 Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	KET
	Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila	
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan PIP	Telah disampaikan dan ditindaklanjuti melalui penyampaian kepada Kantor Staff Presiden
	Rekomendasi hasil evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang terindikasi menentang Ideologi Negara (PN)	
	Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan negara dan ASN yang terindikasi menentang Ideologi Negara (PN)	
	Rekomendasi hasil evaluasi Ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta	

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	KET
	media yang menentang Ideologi Negara (PN)	

BPIP telah melakukan survei tingkat pemahaman, penghayatan, dan aktualisasi Pancasila terhadap 1.624 pendidik, tenaga kependidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan Satuan Pendidikan Kerjasama (sekolah dengan kurikulum asing). Di mana terdiri dari:

- Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara sejumlah 956 Respondern
- Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara 358 Responden
- Rekomendasi hasil evaluasi Ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang menentang Ideologi Negara 310 Responden, di mana presentase dicapai dengan penyusunan metode Evaluasi Hal-Hal yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Lingkungan Media bersama KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).

BPIP juga dalam tahapannya telah melakukan Pengukuran Pelembagaan Pancasila di mana saat ini Metodologi Pengukuran Pelembagaan Pancasila telah selesai disusun, dan Saat ini Pengukuran Pelembagaan Pancasila telah selesai penyusunan logical frame work aplikasi perhitungan Pelembagaan Pancasila beKerja Sama dengan Biro Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pengukuran Pelembagaan Pancasila telah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

d. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Dalam pelaksanaan tugas dan peran organisasi dinyatakan semakin efektif dan efisiennya ditandai dengan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan yang diukur melalui 6 (enam) indikator yaitu sebagai berikut: (i) Nilai Reformasi Birokrasi; (ii) Indeks Sistem Merit; (iii) Opini Laporan Keuangan oleh BPK; (iv) Nilai SAKIP; (v) Indeks Profesionalisme ASN; dan (vi) Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 IKU Capaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Nilai Reformasi Birokrasi	83	66.82
Indeks Sistem Merit	0.81	0.83
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP
Nilai SAKIP	BB	B
Nilai Profesionalisme ASN	83	69,45
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	90,25%

d.1. Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan penilaian hasil evaluasi RB BPIP Tahun 2024, diketahui nilai/hasil akhir penilaian evaluasi RB sebesar 66,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Evaluasi RB BPIP Tahun 2024



SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB	
Hasil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
RB General	64.54
RB Tematik	1.3
Total Nilai	65.84
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	98.5
RB General Penyesuaian	65.52
Index RB	66.82
File Berkas	

Dalam menunjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIP Tahun 2024, telah melakukan rencana aksi, yaitu:

1. Pengisian Rencana Aksi pada Portal RB Nasional sesuai dengan surat dari menpan nomor B/121/RB.04/2024 tentang teknis evaluasi RB 2024;
2. Perubahan Road Map RB BPIP 2020-2024 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 42 tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Rencana Kerja RB BPIP 2024.

d.2. Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit merupakan hasil penilaian pengelolaan sumber daya manusia yang berdasarkan pada prinsip meritokrasi. Penilaian Merit Sistem didasarkan pada Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diketahui bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil

Negara dilingkungan BPIP pada tahun 2023 ditetapkan pada *kategori IV (Baik)* dengan nilai 333 dan indeks 0,83.

Dari hasil penilaian tersebut menunjukkan peningkatan nilai sebesar 27,5 point dari yang sebelumnya 305,5 menjadi 333 pada tahun 2024 dan dari kategori “baik” menjadi kategori “sangat baik”. Beberapa catatan yang perlu diperbaiki pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan sebesar 40

Rekomendasi untuk perencanaan kebutuhan adalah konsistensi untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi dalam sistem informasi kepegawaian sehingga memuat data yang valid dan terkini serta terintegrasi dalam rangka mendukung perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dan mendukung sistem manajemen talenta yang dinamis

2. Pengadaan sebesar 38

Rekomendasi untuk memperbaiki indeks pengadaan adalah dengan mempertajam evaluasi dan menyusun program pengembangan kompetensi terhadap pegawai yang telah mengikuti pelatihan dasar untuk mengetahui potensi dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai kedepan secara jelas dan terstruktur.

3. Pengembangan karier sebesar 95

Rekomendasi untuk memperbaiki indeks pengembangan karier dengan:

- a. Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan, Sosial Kultural dan Teknis sesuai untuk jabatan manajerial serta jabatan non manajerial melalui peraturan atau keputusan pejabat Pembina kepegawaian;
- b. Memperbarui pemetaan kompetensi yang telah dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai dalam rangka mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis;
- c. Menetapkan pedoman manajemen talenta instansi yang telah disusun, lengkap dengan kriteria dan indikator yang terukur melalui peraturan atau keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;

- d. Menyelesaikan pembangunan sistem informasi Manajemen Talenta;
- e. Meningkatkan kualitas analisis ksenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal maupun non-klasikal yang terencana dan terdokumentasi dalam program pengembangan pegawai jangka menengah (dokumen *Human Capital Development Plan*)

4. Promosi dan mutasi sebesar 35

Rekomendasi untuk memperbaiki indeks promosi dan mutasi dengan melaksanakan penyalarsan peraturan tentang pola karier dengan pedoman manajemen talenta serta mengimplementasikannya. Selain itu, dengan melaksanakan pengisian jabatan (promosi/mutasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Manajemen kinerja sebesar 62,5

Rekomendasi untuk memperbaiki indeks manajemen kinerja dengan:

- a. Mengimplementasikan pengelolaan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pemantauan kinerja pegawai secara berkala dan mengoptimalkan dialog kinerja;
- c. Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai serta menyusun strategi mengatasi masalah;
- d. Menjadikan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan dan pembinaan karir pegawai.

6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin sebesar 27,5

Rekomendasi untuk memperbaiki indeks penggajian, penghargaan, dan disiplin dengan:

- a. Memperbarui kebijakan/peraturan tentang pemberian tunjangan kinerja agar dapat mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai sebagai faktor yang utama;
- b. Menetapkan pedoman pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta

melaksanakan pemberian penghargaan tersebut secara rutin/berkala sebagai agenda tetap tahunan;

- c. Pemutakhiran data terkait penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku yang dikelola dalam sistem informasi internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta mengintegrasikan dengan sistem informasi manajemen ASN Nasional yang dikelola oleh BKN

7. Perlindungan dan pelayanan sebesar 16

Rekomendasi untuk memperbaiki indeks perlindungan dan pelayanan dengan menetapkan draft peraturan terpadu tentang pedoman berbagai kebijakan perlindungan yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan pemberian perlindungan kepada pegawai serta meningkatkan bentuk pelayanan kepegawaian melalui inovasi penyediaan sistem informasi yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian

8. Sistem informasi sebesar 19

Rekomendasi untuk memperbaiki indeks sistem informasi dengan:

- a. Menyempurnakan sistem informasi kepegawaian sehingga dapat memiliki data yang saling terintegrasi;
- b. Optimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan kinerja
- c. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian

d.3. Opini Laporan Keuangan BPK

Opini BPK merupakan pernyataan Profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan, BPK memberikan 5 jenis Opini sebagai berikut :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian
4. Opini Tidak Wajar
5. Opini Tidak Memberikan Opini

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. BPK telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat WTP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

BPIP mendapatkan Opini WTP selama empat tahun berturut-turut atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BPIP Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 .

Pada tahun Anggaran 2024, Sekretariat Utama BPIP menargetkan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan BPIP Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan nomor: 42.a/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 terhadap Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 mendapat Opini “WTP”. Perolehan Opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan negara. Keuangan Negara memiliki peranan dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP diantaranya meliputi :

1. Tindaklanjuti hasil temuan tahun sebelumnya.
2. Perbaikan pengelolaan keuangan, menggunakan aplikasi (SIMPATI) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegritas.
3. Perbaikan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

4. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
5. Penguatan pengendalian internal melalui penyusunan manajemen risiko sebagai bagian penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk keandalan pengendalian internal telah mendapatkan penilaian dari BPKP.

d.4. Nilai SAKIP

Pedoman Evaluasi SAKIP adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi SAKIP dengan nomor: B/633/AA.05/2024 menunjukkan bahwa BPIP memperoleh nilai 62,86 atau predikat “B”. dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebelumnya sebesar 61,81. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 20 Hasil Tindak lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	21,64	22,14
b. Pengukuran Kinerja	30	16,93	16,93
c. Pelaporan Kinerja	15	10,07	10,31
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,17	13,48
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,81	62,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Berbagai Upaya dilakukan untuk meningkatkan Nilai SAKIP BPIP seperti Implementasi SAKIP berbasis elektronik melalui sistem APII Kinerja dan tindaklanjut rekomendasi LHE implementasi SAKIP oleh KemenPANRB, dan perbaikan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, namun masih

memerlukan beberapa perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja individu.

d.5. Indeks Profesionalisme ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Penilaian Indeks Profesionalisme ASN di lingkungan BPIP dilakukan oleh BKN. Hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BPIP tahun 2024 adalah hasil dari data 318 PNS yang diukur pada tahun 2023 dengan hasil sebesar **69,45**, di mana nilai ini mendapatkan peningkatan yang signifikan sebesar 5.19 poin dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 64,26 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dimensi kualifikasi sebesar 24,04
2. Dimensi kompetensi sebesar 20,64
3. Dimensi Kinerja sebesar 19,77
4. Dimensi Disiplin sebesar 5,00

Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maka perlu koordinasi dengan unit kerja, terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pemenuhan sasaran penilaian kinerja pegawai. BPIP akan terus melakukan perbaikan dan pemenuhan aspek penilaian yang diwajibkan untuk bisa meningkatkan kualitas Profesionalitas ASN di lingkungan BPIP.

d.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

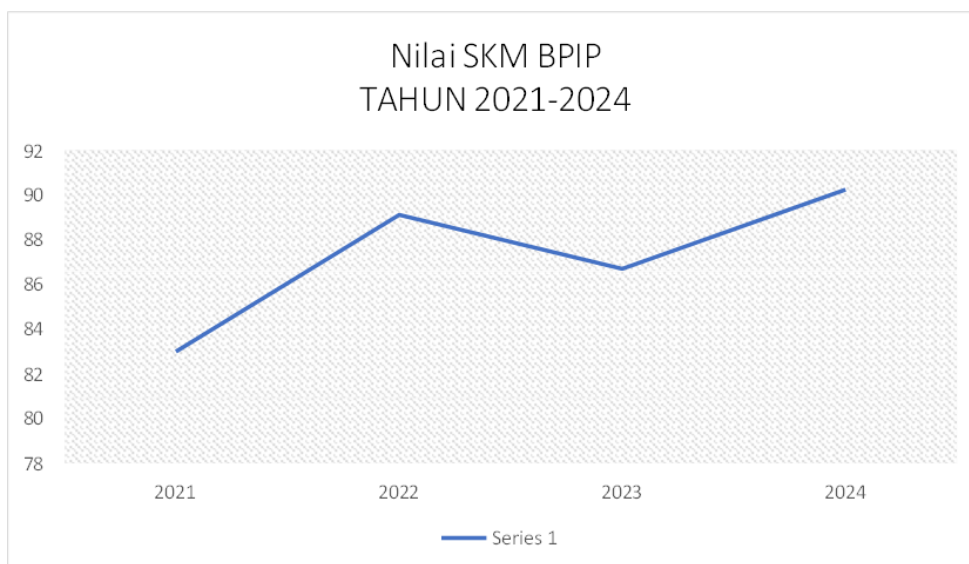
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia pelayanan publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 2 (dua) unit layanan telah menyampaikan laporannya, pada unit layanan secara umum BPIP telah mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM rata- rata yaitu **90,25**. Dari seluruh unit pelayanan yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan- terobosan pelayanan diperlukan

untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Jika melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, *trend* tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup BPIP dapat dilihat melalui grafik berikut:



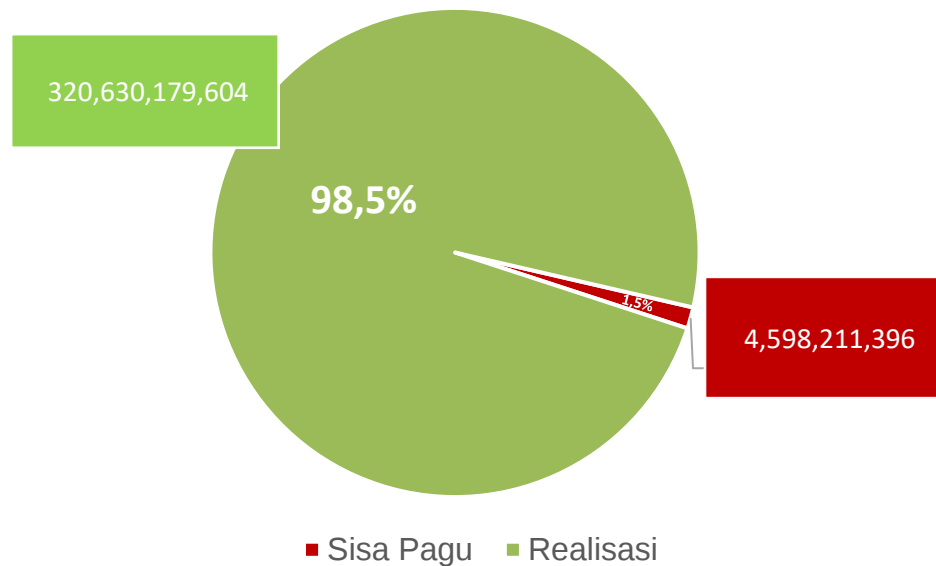
Gambar 3. 14 Nilai SKM BPIP Tahun 2021-2024

B. Capaian Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2024 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp325.228.391.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

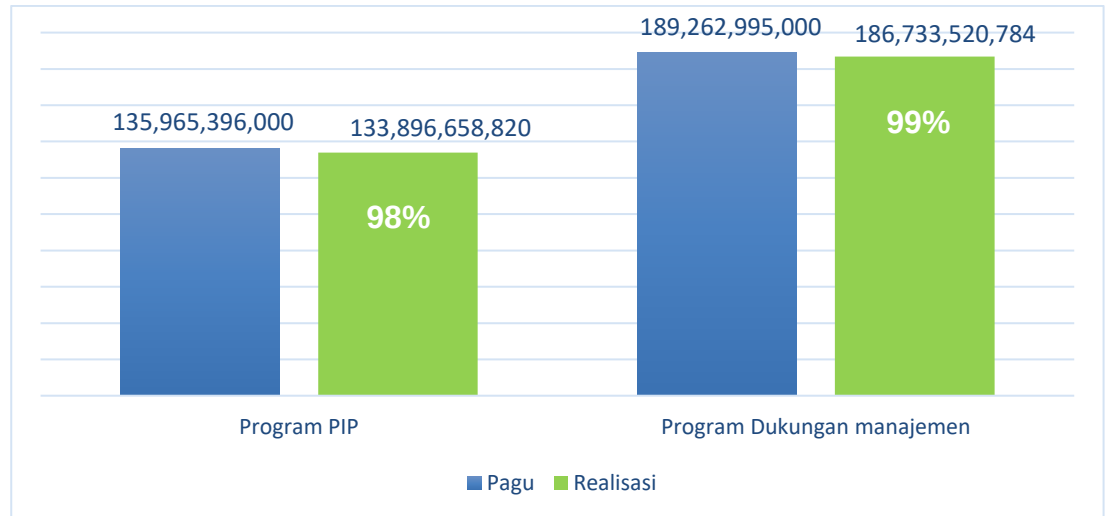
- Program PIP, sebesar Rp135.965.396.000,00;
- Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp189.262.995.000,00.

Realisasi Anggaran hingga 31 Desember 2024 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:



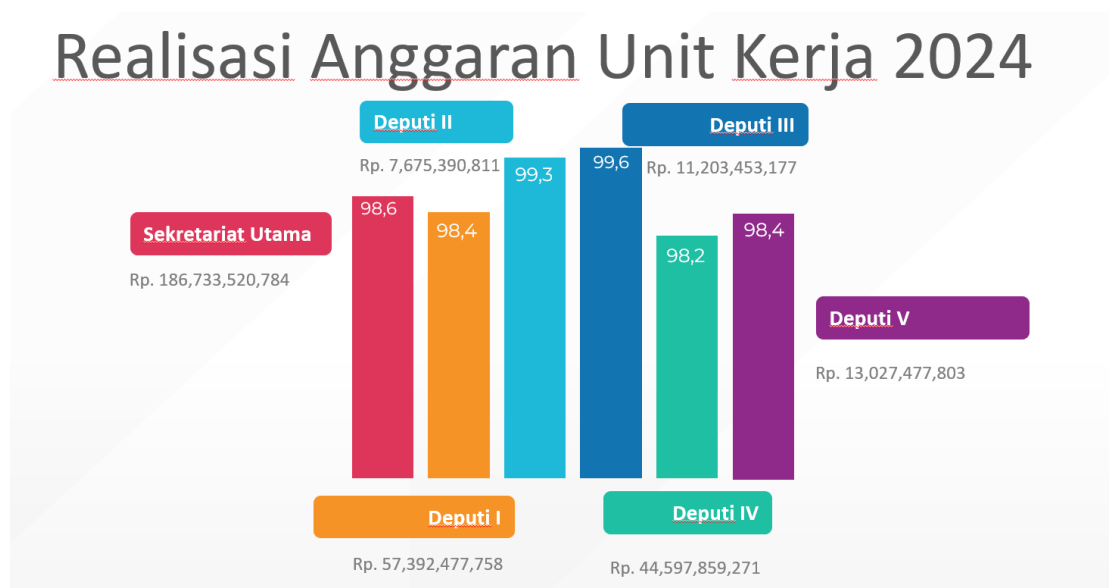
Gambar 3. 15 Realisasi Anggaran Total

Realisasi anggaran per program:



Gambar 3. 16 Realisasi Anggaran per Program

Realisasi anggaran per unit kerja:



Gambar 3. 17 Realisasi Anggaran per Unit Kerja

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		189,262,995,000	186,733,520,784	98.66%	2,529,474,216
1	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	31,350,000,000	31,081,315,266	99.14%	268,684,734
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	133,673,924,000	131,658,443,452	98.49%	2,015,480,548
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	9,851,071,000	9,746,054,516	98.93%	105,016,484
4	Biro Hukum dan Organisasi	8,250,000,000	8,126,672,014	98.51%	123,327,986
5	Biro Pengawasan Internal	2,400,000,000	2,385,202,365	99.38%	14,797,635
6	Pusat Data dan Informasi	3,738,000,000	3,735,833,171	99.94%	2,166,829
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		58,323,191,000	57,392,477,758	98.40%	930,713,242
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	6,479,038,000	6,430,512,527	99.25%	48,525,473
2	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	35,344,153,000	34,506,193,446	97.63%	837,959,554
3	Direktorat Kebudayaan	16,500,000,000	16,455,771,785	99.73%	44,228,215
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		7,727,000,000	7,675,390,811	99.33%	51,609,189
1	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi	3,375,000,000	3,331,905,310	98.72%	43,094,690
2	Direktorat Advokasi	2,702,000,000	2,693,641,482	99.69%	8,358,518
3	Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi	1,650,000,000	1,649,844,019	99.99%	155,981
Deputi Bidang Pengkajian Materi		11,250,000,000	11,203,453,177	99.59%	46,546,823
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,350,000,000	4,313,954,522	99.17%	36,045,478
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,450,000,000	3,440,727,377	99.73%	9,272,623
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,450,000,000	3,448,771,278	99.96%	1,228,722
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		45,425,575,000	44,597,859,271	98.18%	827,715,729
1	Direktorat Perencanaan, Standardisasi Kurikulum	6,847,676,000	6,485,871,416	94.72%	361,804,584

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
2	Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	26,295,619,000	25,942,354,115	98.66%	353,264,885
3	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	12,282,280,000	12,169,633,740	99.08%	112,646,260
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		13,239,630,000	13,027,477,803	98.40%	212,152,197
1	Direktorat Pengendalian	3,356,512,000	3,342,736,164	99.59%	13,775,836
2	Direktorat Evaluasi	3,127,338,000	2,969,210,596	94.94%	158,127,404
3	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	6,755,780,000	6,715,531,043	99.40%	40,248,957
TOTAL		325,228,391,000	320,630,179,604	98.59%	4,598,211,396

Dalam mencapai sasaran strategis PIP di tahun 2024 dapat di simpulkan hambatan, upaya mengatasi hambatan, dan rencana ke depan adalah sebagai berikut:

C. Hambatan

1) Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Di tengah berbagai tantangan yang dapat mengancam ideologi negeri ini, sejatinya mampu menyadarkan kita untuk bercermin dan memaknai sudah sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai upaya untuk mereaktualisasi Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dimulai pemerintah dengan menghadirkan pembangunan mental-budaya melalui program revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Kedua program tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka menghadirkan kembali ideologi Pancasila sebagai benteng pertahanan budaya. Secara dimensi struktural, Pancasila hadir dalam penyelenggaraan ketatanegaraan oleh Kementerian/Lembaga, di mana hal ini selaras dengan kedudukan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan dan ideologi politik

negara. Sedangkan pada dimensi kultural, Pancasila hadir dalam kehidupan warga/masyarakat, di mana hal ini selaras dengan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Permasalahan/isu utama aktualisasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada lima sila yang terdapat pada Pancasila, baik pada kinerja kelembagaan, produk regulasi, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun capaian berdasarkan dimensi sila sudah cukup baik, namun jika dilihat lebih dalam menurut indikator, masih terdapat tantangan yang perlu ditingkatkan lagi dari setiap dimensi. Indikator yang perlu ditingkatkan pada Sila Pertama yaitu indikator persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan kepercayaan lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tantangan pada Sila Kedua yaitu persentase rumah tangga yang setuju adanya aturan tertulis yang mengatur kesetaraan dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya. Sementara itu indikator yang perlu penguatan dalam Sila Ketiga yaitu persentase rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Tantangan pada Sila Keempat yaitu persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah. Sedangkan tantangan pada indikator pada Sila Kelima yaitu persentase desa dengan produk unggulan pangan. Selain itu beberapa kendala yang lain adalah sebagai berikut:

- i. Masih terdapat kendala dalam menciptakan sinergi dan kesepahaman antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah mengenai peran strategis aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- ii. Partisipasi dari berbagai elemen, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan, masih belum optimal dalam pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Keterlibatan yang minim ini mengakibatkan kurangnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan budaya Pancasila;

- iii. Terdapat keterbatasan dalam integrasi dan koordinasi program antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi kegiatan pembinaan ideologi Pancasila masih belum maksimal, sehingga dampak dari setiap program cenderung terfragmentasi dan belum terintegrasi secara menyeluruh.;
- iv. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tingkat masyarakat belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan inovasi dalam pendekatan dan pemanfaatan teknologi informasi serta metode sosialisasi yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.;

2) Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Pemda

- i. Meskipun telah ada upaya kerja sama, sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media masih belum optimal. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi program nilai-nilai Pancasila masih terfragmentasi, sehingga menghambat penciptaan dampak yang lebih luas dan terpadu;
- ii. Belum adanya ruang dialog publik atau musyawarah antar tokoh agama, tokoh nasionalis, kelompok radikal dan kelompok budayawan dalam rangka memetakan permasalahan dan menjembatani pemikiran-pemikiran setiap kelompok agar menemukan titik temu dan solusi;
- iii. Banyak aparatur pemerintah yang belum memperoleh pelatihan intensif mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Keterbatasan kompetensi ini berdampak pada pelaksanaan program yang kurang konsisten serta menurunnya efektivitas kebijakan di lapangan;
- iv. Perbedaan kapasitas dan prioritas antar pemerintah daerah menyebabkan variasi dalam pelaksanaan program PIP. Kesenjangan ini mencerminkan belum adanya standar nasional yang mengikat serta mekanisme pendampingan dan monitoring

yang efektif dari pusat untuk memastikan konsistensi kebijakan di seluruh daerah;

- v. Masih Kebijakan PIP belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan dinamika sosial, sehingga sulit mengikuti kebutuhan zaman;

3) Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional

- i. Masih terdapat daerah yang minim akses teknologi, menghambat distribusi materi PIP secara digital dan memperluas kesenjangan informasi;
- ii. Pelembagaan PIP yang masih lemah pada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Orsospol, Komponen masyarakat lainnya;
- iii. Kurangnya Beberapa komunitas memiliki nilai budaya yang kurang sejalan dengan Pancasila, menyebabkan penolakan atau penerimaan yang rendah terhadap program PIP;
- iv. Kurangnya Data Akurat untuk Pemantauan dan Evaluasi, Data yang tidak lengkap atau tidak mutakhir menyulitkan evaluasi efektivitas program dan pengambilan keputusan berbasis bukti;
- v. Perkembangan sosial dan politik yang dinamis menuntut adaptasi kebijakan PIP yang lebih responsif dan fleksibel.

4) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan SPBE

- i. kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan *reward and punishment* bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya sistem informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indikator penilaian sistem merit internal BPIP;
- ii. Masih adanya beberapa kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan *reward and punishment* bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya sistem informasi yang

- menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indikator penilaian sistem merit internal BPIP;
- iii. Proses penyederhanaan struktur organisasi dan mekanisme kerja di BPIP masih belum sepenuhnya selesai, mengakibatkan alur kerja yang kurang efisien dan potensi tumpang tindih tugas;
- iv. Infrastruktur TIK yang tersedia belum sepenuhnya mendukung penerapan SPBE secara optimal, terutama dalam hal integrasi sistem dan keamanan data.
- v. Belum memiliki portal layanan Satu Data.

D. Upaya Mengatasi Hambatan

- 1) Mendorong keterlibatan generasi muda, perguruan tinggi, dan stakeholder lain dalam pengkajian serta perumusan kebijakan PIP melalui forum dan dialog terbuka;
- 2) Menyelenggarakan forum koordinasi dan musyawarah rutin antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi, swasta, dan komunitas guna menciptakan kesepahaman bersama. Melakukan pembangunan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) Menyelenggarakan dialog lintas sektor (melibatkan tokoh agama, nasionalis, budayawan, dan komunitas) untuk menyatukan pandangan dan solusi dalam mengatasi intoleransi, radikalisme, serta resistensi budaya;
- 4) Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP dan pelaksanaan PIP dalam Diklat calon Paskibraka;
- 5) Memperluas cakupan sosialisasi nilai Pancasila, terutama melalui program edukasi di sekolah-sekolah dan daerah terpencil dengan pendekatan berbasis teknologi;
- 6) Membuka jaringan komunikasi dengan mitra kerja sama BPIP;

- 7) Memastikan pendanaan yang memadai guna mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan dan program internal BPIP;
- 8) Menyusun NSPK dalam bentuk pedoman umum pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- 9) Diselenggarakan pertemuan dengan *stakeholder* BPIP untuk menggali masukan guna sebagai bahan perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila;
- 10) Melaksanakan sosialisasi terkait indikator nilai Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan;
- 11) Melakukan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan alur kerja serta memperjelas mekanisme reward and punishment dan indikator penilaian kinerja (sistem merit) untuk meningkatkan akuntabilitas internal;
- 12) Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas setiap program dan kebijakan, serta melakukan penyesuaian strategi berdasarkan data dan umpan balik stakeholder;
- 13) Mengintegrasikan indikator kinerja yang jelas untuk semua sasaran strategis guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program;
- 14) Menyelenggarakan pelatihan dan workshop rutin untuk meningkatkan kemampuan digital, manajemen kebijakan PIP, dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi pegawai BPIP; dan
- 15) Meningkatkan dan mengintegrasikan sistem informasi internal, termasuk pembangunan portal Satu Data dan sistem pemetaan talenta, untuk mendukung penerapan SPBE secara menyeluruh.

E. Keberlanjutan dan Rencana Ke Depan

Keberlanjutan transformasi yang telah dilakukan antara lain, yaitu:

1. Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Internal:
 - Melakukan peninjauan ulang dan penyesuaian struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antar unit.
 - Meningkatkan transparansi melalui pengembangan sistem informasi manajemen terpadu yang memuat data kinerja dan pemetaan talenta.
 - Menyesuaikan peran dan tanggung jawab masing-masing unit berdasarkan evaluasi capaian 2024.
2. Menyempurnakan kebijakan reward and punishment dengan integrasi sistem merit yang lebih objektif dan transparan.
3. Akselerasi mutasi jabatan dan rotasi pegawai guna mempercepat inovasi serta pencapaian target organisasi.
4. Pengembangan dan Konsolidasi Infrastruktur Teknologi Informasi:
 - Aplikasi Meneruskan konsolidasi aplikasi yang ada dengan kebijakan bahwa pengembangan dilakukan terpusat di Pusat Data dan Teknologi Informasi.
 - Melakukan evaluasi efektivitas penggunaan aplikasi, dengan target peningkatan aplikasi aktif dan penonaktifan aplikasi yang tidak terpakai.
 - Pengembangan portal Satu Data internal sebagai pusat informasi kinerja, aset, dan data strategis BPIP.
5. Percepatan Optimalisasi pengelolaan aset (BMN) dan pengadaan dengan nilai besar melalui mekanisme kontrol dan pengawasan yang lebih ketat.
6. Mitigasi risiko temuan audit oleh BPK atas Laporan Keuangan Tahun sebelumnya, dengan cara Reviu atau Audit Triwulanan oleh Biro Wasnal, meliputi:
 - Melaksanakan audit triwulanan oleh Biro Wasnal guna mengantisipasi temuan audit eksternal dan mempercepat penyelesaian temuan T-1.

- Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program, dengan indikator yang jelas.
- Pengadaan Barang/Jasa dengan Rupiah besar (Misal: Sosialisasi Pancasila, Media Sosialisasi)

7. Penguatan Komunikasi dan Rapat Internal:

- Menyempurnakan metode rapat pimpinan dengan mekanisme rapat mingguan (Rapim) untuk laporan kinerja, rapat tematik bagi unit yang menghadapi hambatan, serta rapat pleno untuk arahan strategis.
- Rapat Meningkatkan koordinasi antar unit melalui platform digital dan forum internal rutin guna memastikan alur komunikasi yang efektif dan responsif.

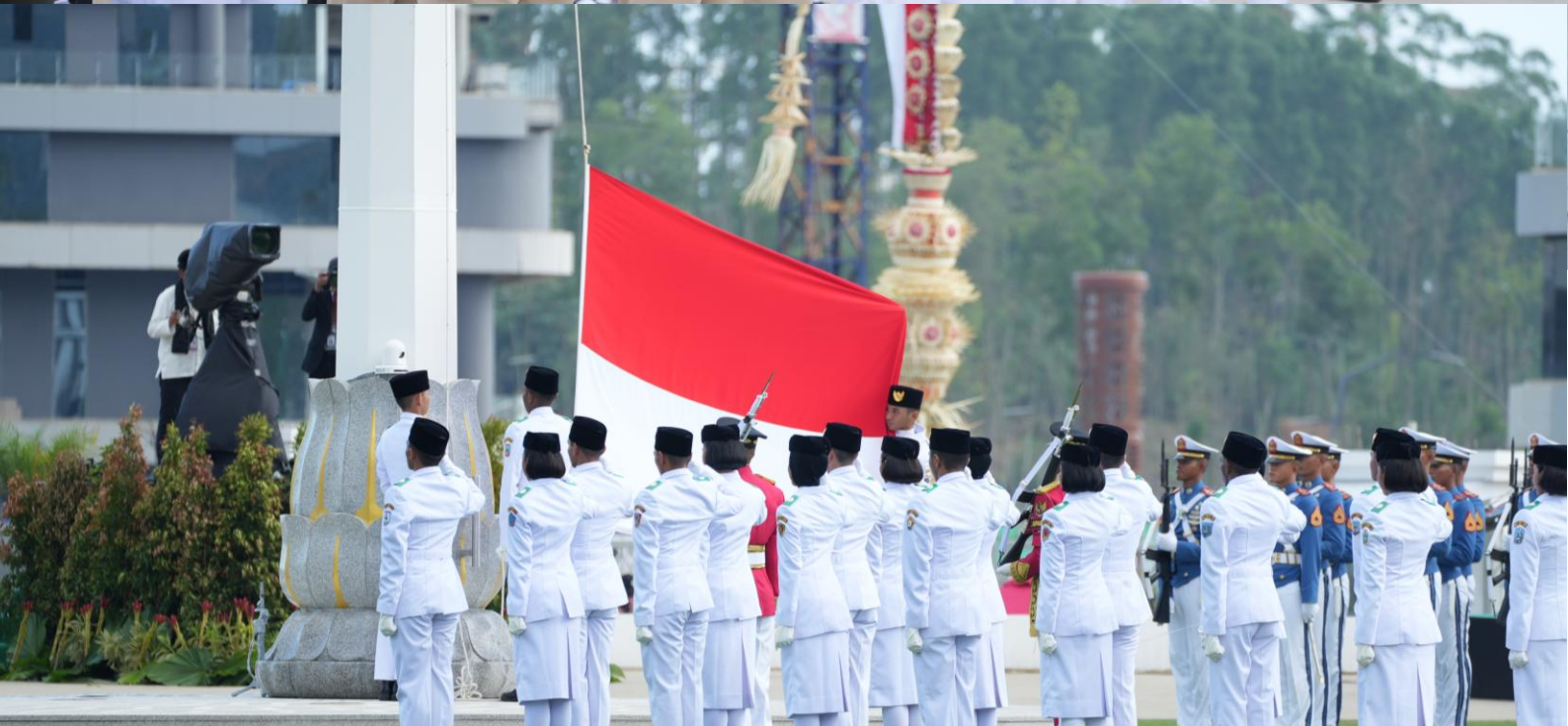
Capaian kinerja BPIP tahun 2024 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 97,34% (NKI-Nilai Kinerja Instansi). Terdapat beberapa indikator yang masih perlu penguatan pada perspektif kapasitas organisasi BPIP, diantaranya adalah: Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai Profesionalisme ASN, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Sistem Merit. Walaupun terjadi penurunan nilai NKI dari tahun sebelumnya, BPIP tetap berupaya untuk memperbaiki kinerjanya agar lebih baik dan selalu siap dengan perkembangan tuntutan para pemangku kepentingan, sehingga kinerja BPIP dapat semakin dirasakan keberadaannya dalam menjaga kondisi Bangsa Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

PENUTUP



UPACARA KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS DI IKN

BAB IV | PENUTUP

BPIP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik pasca-pandemi, peran strategis BPIP dalam membumikan nilai-nilai Pancasila semakin relevan. Aktualisasi Pancasila harus dapat dirasakan di setiap aspek kehidupan, membangun karakter bangsa yang berdaya saing, berintegritas, dan berkeadaban.

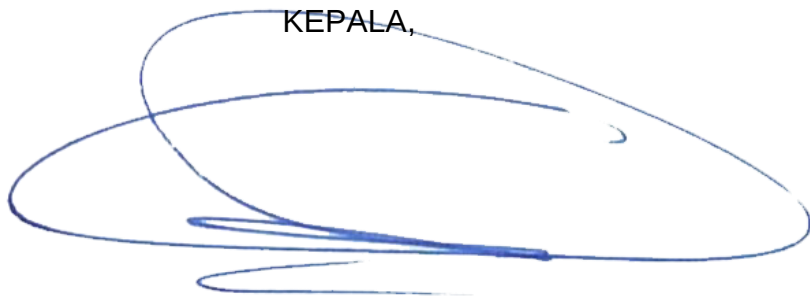
Akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap langkah BPIP. Indikator kinerja yang terukur, pengelolaan anggaran yang efisien, serta penerapan tata kelola yang transparan menjadi landasan utama dalam meningkatkan efektivitas dan kredibilitas organisasi.

Laporan Kinerja diharapkan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga menjadi refleksi untuk terus berbenah dan berinovasi. Dengan semangat kolaborasi dan responsivitas terhadap kebutuhan bangsa, BPIP akan terus memperkuat perannya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan berkembang dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara..

SALAM PANCASILA!

Jakarta, 19 Februari 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2024



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Jalan Veteran III NO.2 Jakarta 10110 Telepon (021) 3505200
Situs Web: <http://bPIP.co.id> Alamat Surel: persuratan@bPIP.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yudian Wahyudi**

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2024

Kepala BPIP,

Yudian Wahyudi

| PK 2024



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Jalan Veteran III NO.2 Jakarta 10110 Telepon (021) 3505200
Situs Web: <http://bpip.co.id> Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Terwujudnya Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Secara Nasional	Rekomendasi yang Disampaikan Kepada Presiden	5 Rekomendasi
Terwujudnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Koordinator dalam Pelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara Pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase Kementerian/Lembaga/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang Melaksanakan Institusionalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	100%
Terwujudnya Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila	77
Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan PIP yang Berkualitas Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	83
	Indeks Sistem Merit	0,81
	Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP
	Nilai SAKIP	BB
	Indeks Profesionalisme ASN	83
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%

Program : Pembinaan Ideologi Pancasila

Anggaran : Rp. 342.269.037.000,-

Jakarta, Januari 2024

Kepala BPIP,

Yudian Wahyudi

| PK 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RO PN / Tidak	Satuan	Target 2024	CAPAIAN TARGET 2024		Anggaran (Ribu Rupiah)	REALISASI ANGGARAN 2024	
					(Angka)	%		(Rupiah)	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K/L: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila									
Program Pembinaan Ideologi Pancasila									
	6926. Penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Pembudayaan Ideologi Pancasila								
	AEC. Kerjasama								
	Kesepakatan Pengembangan Hubungan Kemitraan Antar Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen masyarakat Lainnya (Non Prioritas)	Tidak	Kesepakatan	4	16	400%	489,711,000	479,906,033	98.00%
	AEE. Kemitraan								
	Kesepakatan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang non-Prioritas	Tidak	Kesepakatan	3	3	100%	500,000,000	489,831,700	97.97%
	PEC.Kerjasama								
	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas	PN	Kesepakatan	20	45	225%	2,592,296,000	2,579,145,870	99.49%
	PEE. Kemitraan								
	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas	PN	Kesepakatan	25	24	96.00%	2,897,031,000	2,881,628,924	99.47%
	QMB. Komunikasi Publik								
	Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah	PN	Dokumen	5	5	100.00%	25,330,656,000	24,573,866,888	97.01%
	Layanan Komunikasi melalui Media Massa	PN	Dokumen	4	4	100.00%	10,013,497,000	9,932,326,558	99.19%
	ABN.Kebijakan Bidang Sosial								
	Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila	Tidak	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	2,435,203,000	2,391,306,910	98.20%
	QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebijakan Pancasila	PN	Kelompok Masyarakat	150	150	100%	14,064,797,000	14,064,464,875	100.00%
	6927. Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum, Advokasi, serta Pengawasan Regulasi								
	PBD. Kebijakan Bidang Hukum dan HAM								
	Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila	PN	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100.00%	2,965,000,000	2,922,490,197	98.57%
	ABD.002 Kebijakan Bidang Hukum dan HAM								
	Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial/Politik dan Komponen Masyarakat lainnya serta Purnapaskibraka	Tidak	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100.00%	2,702,000,000	2,693,641,482	99.69%
	ABD.001 Kebijakan Bidang Hukum dan HAM								
	Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi Dan Institusionalisasi Pancasila Dalam Hukum Nasional Dan Peraturan Daerah	Tidak	Rekomendasi Kebijakan	1	0	80.00%	410,000,000	409,415,113	99.86%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RO PN / Tidak	Satuan	Target 2024	CAPAIAN TARGET 2024		Anggaran (Ribu Rupiah)	REALISASI ANGGARAN 2024	
					(Angka)	%		(Rupiah)	%
	ABD.003 Kebijakan Bidang Hukum dan HAM								
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila	Tidak	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100.00%	1,650,000,000	1,649,844,019	99.99%
	6928 Penyelenggaraan Pengkajian Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila								
	PBN. Kebijakan Bidang Sosial								
	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila	PN	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100.00%	4,350,000,000	4,313,954,522	99.17%
	AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								
	Nspk Materi, Bahan Ajar Dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila	Tidak	NSPK	1	1	100.00%	3,450,000,000	3,440,727,377	99.73%
	ABN. Kebijakan Bidang Sosial								
	Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Tidak	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	3,450,000,000	3,448,771,278	99.96%
	6929. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila								
	PBN. Kerja sama								
	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP	PN	Rekomendasi Kebijakan	3	4	133.33%	255,000,000	254,661,946	99.87%
	PDE. Akreditasi Lembaga								
	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	PN	Lembaga	10	23	230.00%	1,620,691,000	1,617,103,007	99.78%
	PFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								
	Nspk Standardisasi Dan Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	PN	NSPK	7	9	128.57%	3,335,604,000	2,978,188,101	89.28%
	PDI. Pelatihan Bidang Sosial								
	Sertifikasi Pendidik Dan Pelatih Diklat PIP	PN	Orang	200	572	286.00%	1,636,381,000	1,635,918,362	99.97%
	SCJ. Pelatihan Bidang Sosial								
	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	PN	Layanan	500	105	35.00%	3,547,564,000	3,482,920,697	98.18%
	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	PN	Layanan	1500	856	57.07%	8,734,716,000	8,686,713,043	99.45%
	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat								
	Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka Dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	PN	Orang	6600	5822	88.21%	26,295,619,000	25,942,354,115	98.66%
	6930. Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila								
	ABC.001 Kebijakan Bidang Politik								
	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Tidak	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	3,356,512,000	3,342,736,164	99.59%
	PBN. Kebijakan Bidang Sosial								

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RO PN / Tidak	Satuan	Target 2024	CAPAIAN TARGET 2024		Anggaran (Ribu Rupiah)	REALISASI ANGGARAN 2024	
					(Angka)	%		(Rupiah)	%
	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila	PN	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	4,865,000,000	4,828,668,155	99.25%
	ABC.002 Kebijakan Bidang Politik								
	Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila	Tidak	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	1,890,780,000	1,886,862,888	99.79%
	ABC.003 Kebijakan Bidang Politik								
	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Tidak	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	853,009,000	825,087,948	96.73%
	PBC. Kebijakan Bidang Politik								
	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara	PN	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	814,770,000	730,492,027	89.66%
	Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara Dan Asn Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara	PN	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	727,693,000	684,158,019	94.02%
	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara	PN	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00%	731,866,000	729,472,602	99.67%
	Program Dukungan Manajemen								
	Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja								
	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Tidak	Dokumen	1	1	100.00%	5,977,571,000	5,970,777,074	99.89%
	Layanan Penyusunan Laporan Monev	Tidak	Dokumen	1	1	100.00%	610,861,000	601,143,060	98.41%
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Tidak	Dokumen	3	3	100.00%	27,000,000	24,491,410	90.71%
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Tidak	Dokumen	6	6	100.00%	1,508,639,000	1,474,425,211	97.73%
	Layanan Manajemen Keuangan	Tidak	Dokumen	1	1	100.00%	1,727,000,000	1,675,217,761	97.00%
	Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal								
	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	Layanan Audit Internal	Tidak	Laporan	1	1	100.00%	2,400,000,000	2,385,202,365	99.38%
	Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan								
	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	Layanan Manajemen Aset	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	695,000,000	691,581,480	99.51%
	Layanan BMN	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	139,000,000	132,194,220	95.10%
	Layanan Umum	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	1,166,000,000	1,158,640,501	99.37%
	Layanan Perkantoran	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	117,663,924,000	116,640,457,163	99.13%
	EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
	Layanan Sarana Internal	Tidak	Unit	40	429	1072.50%	7,010,000,000	6,590,870,418	94.02%
	EBC. Layanan Manajemen SDM Internal								
	Layanan Manajemen SDM	Tidak	Orang	441	706	160.09%	5,966,603,000	5,606,881,685	93.97%
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Tidak	Orang	95	401	422.11%	1,033,397,000	837,817,985	81.07%
	Pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian								
	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	Layanan Tata Kehumasan dan Informasi	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	7,062,563,000	6,926,469,688	98.07%
	Layanan Protokol	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	22,024,437,000	21,905,253,318	99.46%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RO PN / Tidak	Satuan	Target 2024	CAPAIAN TARGET 2024		Anggaran (Ribu Rupiah)	REALISASI ANGGARAN 2024	
					(Angka)	%		(Rupiah)	%
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	413,000,000	411,060,000	99.53%
	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Tidak	Dokumen	1	1	100.00%	1,850,000,000	1,838,532,260	99.38%
	Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi								
	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	Layanan Hukum	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	6,671,526,000	6,558,168,174	98.30%
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	1,578,474,000	1,568,503,840	99.37%
	Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi								
	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	Layanan Data dan Informasi	Tidak	Layanan	1	1	100.00%	3,738,000,000	3,735,833,171	99.94%



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

www.bpip.go.id